

**PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI PEMODERASI**

SKRIPSI



Oleh

ISMA HANI

NIM : 220502110001

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

**PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI PEMODERASI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh

ISMA HANI

NIM : 220502110001

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI PEMODERASI

SKRIPSI

Oleh

Isma Hani

NIM : 220502110001

Telah Disetujui Pada Tanggal 8 Juni 2026

Dosen Pembimbing,



Sri Andriani, M.Si

NIP. 197503132009122001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI PEMODERASI

SKRIPSI

Oleh

Isma Hani

NIM : 220502110001

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 29 Juni 2026

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1 Ketua Penguji

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A

NIP. 197307192005011003



2 Anggota Penguji

Novi Lailiyul Wafiroh, M.A

NIP. 199211012019032020



3 Sekretaris Penguji

Sri Andriani, M.Si

NIP. 197503132009122001



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Kholilah, M.S.A

NIP. 1987071920190302010

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isma Hani
NIM : 220502110001
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Pemoderasi”

Adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Malang, 17 Juni 2026

Hormat saya,



Isma Hani

NIM: 220502110001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini saya persembahkan sebagai wujud perjalanan panjang yang penuh pembelajaran, perjuangan, dan doa yang tak pernah putus.

Skripsi ini saya dedikasikan untuk kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang tanpa batas, doa yang tiada henti, serta dukungan yang menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah saya. Tanpa bapak dan ibu, perjalanan ini tidak akan pernah sampai pada titik ini.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk keluarga, sahabat dan teman-teman, serta semua pihak yang telah hadir dalam perjalanan hidup saya, yang memberikan semangat, motivasi, serta menjadi bagian dari proses pendewasaan diri. Setiap dukungan sekecil apa pun, memiliki arti yang begitu besar.

Terakhir, tidak lupa skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan.

You made it this far, and that is something to be proud of.

Saya menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah-langkah berikutnya. Oleh karena itu, saya menyelipkan harapan dalam akhir lembar persembahan ini, agar ilmu yang telah diperoleh dapat bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan masa depan yang lebih baik.

Success is not the end, failure is not the opposite of success, it is part of success.

Keep going, even when it feels slow. Progress is still progress.

Semoga ke depan saya mampu terus berkembang, menjadi pribadi yang lebih kuat, dan tidak pernah berhenti bermimpi serta berusaha meraih masa depan yang lebih baik.

MOTTO

“Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras
(untuk urusan yang lain)”

(QS. Al-Insyirah: 7)

“Setiap akhir adalah awal baru untuk terus berusaha dan tidak berhenti
melangkah”

“Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa
yang mampu bertahan dalam setiap prosesnya. Karena pada akhirnya, mereka
yang tidak menyerah adalah mereka yang benar-benar menemukan arti dari
sebuah perjuangan”

(Tere Liye)

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Allah SWT yang sudah memberi banyak berkah, bimbingan, serta petunjuk-Nya, sampai penulis bisa menuntaskan karya skripsi ini dengan berjudul “Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Pemoderasi”, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis memahami bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat tercapai tanpa dukungan, bantuan, arahan, dan saran dari banyak pihak selama proses penulisannya. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa syukur yang besar kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahan dan fasilitasi selama masa studi
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Kholilah, SE., MSA., Ak., CA., CFA sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, atas kepemimpinan dan dukungannya dalam proses akademik.
4. Ibu Sri Andriani, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini hingga akhir.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh studi.

6. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis mempersembahkan penghargaan untuk kedua orang tua tersayang, Bapak Hariyanto dan Ibu Sutin, atas segala kasih sayang, doa, motivasi, serta dukungan yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar yang telah memberi perhatian, dukungan, dan semangat secara berkelanjutan kepada penulis.
8. Farhan Firmansyah yang selalu menemani dan menjadi *support system* dalam perjalanan perkuliahan penulis hingga pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, serta memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis.
9. SUHU girls, Azka, Tikha, dan Jihan serta teman sekamar penulis yang menjadi teman terbaik penulis mulai dari mahasiswa baru hingga saat ini sebagai mahasiswa akhir selalu menemani dan berteman baik dengan penulis.
10. Seluruh teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2022, telah berjuang Bersama dan saling memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman terdekat penulis di masa sekolah, yang saat ini masih selalu menjalin hubungan komunikasi dengan baik.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis memahami bahwa karya ini masih mempunyai beberapa kekurangan. Oleh sebab itu, penulis terbuka untuk menerima berbagai saran dan masukan untuk perbaikan di kemudian hari. Semoga karya ini bisa memberikan nilai positif bagi semua pembaca.

Malang, 02 Juni 2026

Isma Hani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
المخلص	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Batasan Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kajian Teoritis.....	24
2.2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	24
2.2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	25
2.2.3 Belanja Modal	26
2.2.4 Pendapatan Asli Daerah	27
2.2.5 Pertumbuhan Ekonomi.....	28
2.2.6 Partisipasi Masyarakat	29
2.2.7 Kajian Islam Tentang Kinerja Keuangan	29

2.3	Kerangka Konseptual	31
2.4	Hipotesis.....	32
2.4.1	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	32
2.4.2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	33
2.4.3	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	34
2.4.4	Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	34
2.4.5	Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	35
2.4.6	Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	36
BAB III	METODE PENELITIAN.....	38
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
3.2	Lokasi Penelitian.....	38
3.3	Populasi dan Sampel	38
3.3.1	Populasi.....	38
3.3.2	Sampel.....	39
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.....	39
3.5	Data dan Jenis Data.....	40
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7	Definisi Operasional Variabel.....	41
3.7.1	Variabel Terikat (Dependen).....	41
3.7.2	Variabel Bebas (Independen).....	42
3.7.3	Variabel Moderasi.....	43
3.8	Analisis Data	45
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif	45
3.8.2	Analisis Pemilihan Model	45
3.8.3	Analisis Regresi Data Panel	46
3.8.4	Uji Asumsi Klasik.....	47
3.8.5	Pengujian Hipotesis.....	47
3.8.6	Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).....	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Hasil Penelitian	50
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	50
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif	50
4.1.3 Analisis Pemilihan Model	51
4.1.4 Analisis Regresi Data Panel	53
4.1.5 Uji Asumsi Klasik	54
4.1.6 Uji Hipotesis	55
4.1.7 Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	56
4.2 Pembahasan	58
4.2.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan	58
4.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan	59
4.2.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan	59
4.2.4 Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan	60
4.2.5 Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan	61
4.2.6 Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan	62
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR LAMPIRAN	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur.....	4
Gambar 2. 2 Bagan Kerangka Konseptual.....	32
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3. 1 Sampel Penelitian.....	39
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel.....	44
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow.....	52
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman.....	52
Tabel 4. 4 Hasil Regresi Data Panel.....	53
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	55
Tabel 4. 7 Hasil Uji R ² atau Koefisien Determinasi.....	56
Tabel 4. 8 Hasil Uji Statistik T (Parsial).....	56
Tabel 4. 9 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	74
Lampiran 2 Hasil Uji Chow	74
Lampiran 3 Hasil Uji Hausman.....	74
Lampiran 4 Hasil Analisis Regresi Data Panel	75
Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas	75
Lampiran 6 Hasil Uji Multikolinearitas	75
Lampiran 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	75
Lampiran 8 Hasil Uji R ² atau Koefisien Determinasi	76
Lampiran 9 Hasil Uji Statistik T (Parsial).....	76
Lampiran 10 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	76
Lampiran 11 Biodata Penulis	78
Lampiran 12 Jurnal Bimbingan.....	80
Lampiran 13 Hasil Test Plagiarisme	82

ABSTRAK

Isma Hani, 2026, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Pemoderasi”

Pembimbing : Sri Andriani, M.Si

Kata Kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Kinerja Keuangan, Partisipasi Masyarakat.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi dampak dari belanja modal, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta meneliti fungsi partisipasi masyarakat sebagai variabel yang memoderasi. Fokus penelitian mencakup pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur selama rentang waktu 2020–2024. Metodologi yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data panel dan analisis regresi moderasi (MRA) untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel serta menguji hubungan antarvariabel serta pengaruh moderasi partisipasi masyarakat terhadap hubungan tersebut yang difasilitasi oleh perangkat lunak *Eviews* versi 12. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dan menghasilkan data yang terdiri dari 38 sampel kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu periode 2020-2024 sehingga total data pengamatan sebanyak 190 data.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa belanja modal dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, pendapatan asli daerah (PAD) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD cenderung diikuti oleh membaiknya kinerja keuangan pemerintah daerah karena mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan serta menjalankan otonomi daerah secara mandiri. Selain itu, partisipasi masyarakat terbukti mampu memperkuat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar kontribusi PAD dalam mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah. Keterlibatan masyarakat, terutama melalui kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, berpotensi meningkatkan penerimaan daerah sehingga memperkuat PAD dan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak mampu memoderasi hubungan antara belanja modal maupun pertumbuhan ekonomi dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT

Isma Hani, 2026, *THESIS*. Title: "*The Effect of Capital Expenditure, Regional Original Revenue, and Economic Growth on the Financial Performance of Local Governments with Community Participation as Moderator*"

Supervisor : Sri Andriani, M.Si

Keywords: *Capital Expenditure, Regional Original Income, Economic Growth, Financial Performance, Community Participation.*

This study aims to evaluate the impact of capital expenditure, local revenue, and economic growth on the financial performance of local governments, as well as to examine the role of community participation as a moderating variable. The study focuses on regency and city governments in East Java Province over the period 2020–2024. The methodology applied in this study is a quantitative approach using panel data analysis and moderation regression analysis (MRA) to identify relationships between variables and test the influence of community participation as a moderator on these relationships, facilitated by Eviews software version 12. The sampling technique used was saturated sampling, yielding data consisting of 38 regencies/cities in East Java Province over the 2020–2024 period, resulting in a total of 190 observations.

The research findings indicate that capital expenditure and economic growth do not affect local government financial performance. Conversely, local revenue (PAD) has been shown to have a positive and significant impact on local financial performance. These findings suggest that an increase in local revenue tends to be followed by an improvement in local government financial performance, as it reflects the region's ability to finance government activities and exercise regional autonomy independently. Furthermore, public participation has been shown to strengthen the impact of PAD on the financial performance of local governments. In other words, the higher the level of public participation, the greater the contribution of PAD in driving improvements in local financial performance. Public involvement, particularly through compliance with local tax payment obligations, has the potential to increase local revenue, thereby strengthening PAD and the fiscal autonomy of local governments. However, this study also indicates that public participation does not moderate the relationship between capital expenditure or economic growth and the financial performance of local governments.

الملخص

إسما هاني، ٢٠٢٦ ، الأطروحة. العنوان: "تأثير الإنفاق الرأسمالي، الإيرادات الإقليمية الأصلية، والنمو الاقتصادي على الأداء المالي للحكومات المحلية بمشاركة المجتمع كمنسق"
المشرف: السيد أندرياني، M.Si
الكلمات المفتاحية: الإنفاق الرأسمالي، الدخل الإقليمي الأصلي، النمو الاقتصادي، الأداء المالي، مشاركة المجتمع.

تفحص هذه الدراسة تأثير الإنفاق الرأسمالي والإيرادات المحلية والنمو الاقتصادي على الأداء المالي للحكومات المحلية، بالإضافة إلى تأثير الاعتدال في المشاركة المجتمعية في المناطق/المدن في مقاطعة جاوة الشرقية من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤. تعتمد منهجية البحث المستخدمة على نهج كمي باستخدام تحليل بيانات اللوحات وتحليل الانحدار المعتدل (MRA) الذي يتيسره برنامج *Eviews* الإصدار ١٢. تستخدم تقنية أخذ العينات تقنية أخذ عينات مشبعة وتنتج بيانات تتكون من ٣٨ منطقة/مدينة في مقاطعة جاوة الشرقية خلال الفترة ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤، بحيث يصبح إجمالي بيانات الملاحظة ١٩٠ ببيانة.

تظهر نتائج الدراسة أن الإنفاق الرأسمالي والنمو الاقتصادي لا يؤثر على الأداء المالي للحكومات المحلية. ومع ذلك، فإن الإيرادات الإقليمية الأصلية لها تأثير إيجابي على الأداء المالي، مما يعني أنه كلما زادت الإيرادات الإقليمية الأصلية، كان الأداء المالي للحكومة المحلية أفضل، مما يعكس مستوى الاستقلالية في تمويل تنفيذ استقلالها الإقليمي الخاص. تظهر نتائج الدراسة أيضا أن المشاركة المجتمعية يمكن أن تعزز تأثير الدخل المحلي الأصلي على الأداء المالي للحكومات المحلية. وجود مشاركة المجتمع في دفع الضرائب الإقليمية بشكل مطيع يمكن أن يزيد من الدخل الإقليمي، مما يعزز الدخل المحلي الأصلي ويدعم استقلالية الحكومة في تمويل الحكم الذاتي الإقليمي. ومع ذلك، لا يمكن لمشاركة المجتمع أن تخفف من تأثير الإنفاق الرأسمالي والنمو الاقتصادي على الأداء المالي للحكومات المحلية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan pemerintah mengenai otonomi daerah dapat dibuat berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan hak, kekuasaan, serta kewajiban wilayah otonom yang mengelola serta menjalankan pemerintahan secara mandiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini juga menetapkan dasar hukum yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk pembagian urusan pemerintahan, pembentukan perangkat daerah, hingga kaitan finansial antara institusi pusat dan otoritas daerah. Otonomi daerah diserahkan kepada otoritas daerah guna menyediakan kemampuan adaptasi saat menyampaikan layanan umum yang lebih baik, meningkatkan responsivitas dan efisiensi, serta memperkuat peran dalam perekonomian dan sistem antarpemerintah (Zamzami & Rakhman, 2023; Saud *et al.*, 2020). Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan daerah yang sejalan dengan kondisi keuangan daerah, diperlukan penyempurnaan mekanisme kemajuan ekonomi pasca implementasi peraturan otonomi daerah serta pengorganisasian finansial yang mencapai target, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ardelia *et al.*, 2022). Otonomi daerah memberi kesempatan bagi pemerintah setempat untuk mengembangkan wilayah mereka dan membawa warga menuju kesuksesan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mendayagunakan potensi serta kekayaan yang tersedia di setiap daerah. Karakteristik utamanya suatu daerah sebagai daerah otonom yakni keterampilan finansial daerah tersebut, yang dimana daerah otonom membutuhkan kekuatan dan kemampuan untuk mengeksplorasi sumber daya keuangan mereka sendiri (Simamora & Budiwitjaksono, 2022).

Pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan fungsinya apabila pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan mensyaratkan adanya transparansi dan akuntabilitas. Sari & Aztisya (2022) berpendapat bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yaitu penyampaian laporan keuangan pemerintah harus menaati asas kedisiplinan dan dirumuskan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem yang sangat komprehensif dan terorganisir bersama dengan pedoman APBD, membantu menyusun laporan keuangan otoritas lokal (Andjarwati *et al.*, 2021). Otoritas daerah menyajikan laporan keuangan sebagai dasar pertanggungjawaban daerah kepada publik, namun apabila terdapat penyimpangan dalam laporan keuangan tersebut, maka terdapat indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut kurang berkinerja dengan baik (Ardelia *et al.*, 2022). Kinerja pemerintahan pasti akan meningkat jika pengendalian finansial daerah dilaksanakan dengan benar dan selaras dengan kebijakan.

Pemerintahan daerah atau perusahaan sektor publik tidak sama dengan sektor swasta dalam hal tujuan, struktur, dan proses pengukuran kinerja. Satu diantara beberapa metode yang sering diterapkan guna mengevaluasi kinerja finansial otoritas wilayah yaitu dengan analisis ratio keuangan. Berdasarkan Sari & Aztisya (2022); Simamora & Budiwitjaksono (2022); dan Agustina & Wardoyo (2024), evaluasi kinerja finansial otoritas daerah bisa dilaksanakan caranya yaitu dengan menganalisis rasio dengan data yang terdapat dalam laporan keuangan, terutama APBD. Penilaian ini dilaksanakan guna memperkirakan sampai mana tingkat efektif otoritas daerah saat mengendalikan serta menggunakan potensi kekayaan finansial yang ada demi mencapai tujuan pembangunan wilayah. Karena analisis rasio keuangan memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai kesehatan finansial pemerintah daerah dalam jangka panjang. Selain itu, pada penelitian Andriani (2012), ia menekankan bahwa selain pengukuran melalui rasio keuangan, penting pula menerapkan konsep “*value for money*” dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah, yang mencakup dimensi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian oleh Awani & Hariani (2021) menunjukkan bahwa rasio

kemandirian serta rasio keuangan yang lain berpengaruh pada kinerja finansial. Sementara itu, penelitian oleh Arifah *et al.* (2023) juga menemukan bahwa analisis rasio keuangan yakni rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, serta pertumbuhan dapat berfungsi sebagai alat ukur yang berguna saat memperkirakan kinerja finansial otoritas daerah. Dari pengukuran tersebut, hasilnya pada APBD bisa dipergunakan berdasarkan pedoman guna mengukur kemampuan otoritas daerah saat mengelola dan memanfaatkan dana yang ada.

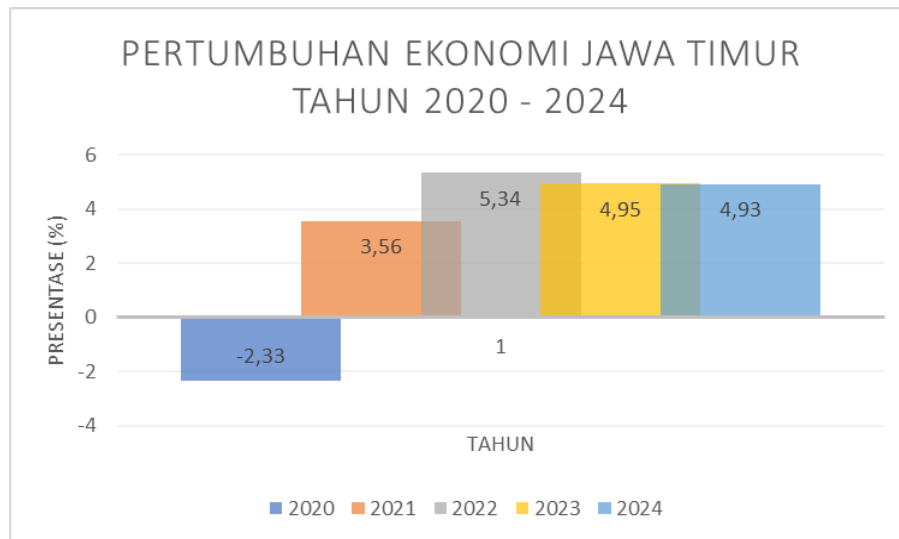
Kinerja keuangan adalah satu diantara tolok ukur yang dimanfaatkan sebagai menganalisis apakah manajemen finansial pada wilayah telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu mendukung keberlanjutan pelayanan publik. Selain itu, tingkat kinerja keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pihak eksternal, termasuk investor, dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modal di daerah tersebut (Nurhayati & Hamzah, 2020). Peningkatan hasil keuangan daerah adalah salah satu langkah untuk memperkuat tingkat kemandirian dan penerapan otonomi daerah. Oleh sebab itu, analisis dan penilaian yang terus-menerus terhadap indikator hasil finansial daerah bermanfaat guna mencapai pengelolaan keuangan dengan efisien juga optimal, dengan cara menganalisis elemen-elemen yang bisa menjadi peluang penting untuk mengoptimalkan keuangan daerah (Maulina *et al.*, 2021). Situasi ini penting sebab dampak dari analisis kinerja keuangan bisa memberikan sudut pandang baru untuk pengurus finansial daerah dalam usaha demi memperbaiki mutu finansial daerah.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori keagenan, yang melihat pemerintah sebagai agen yang memiliki kewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan strategi guna memenuhi kepentingan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam hubungan ini, masyarakat mengharapkan pemerintah mampu menunjukkan kinerja yang baik melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas serta penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, efektivitas strategi yang diterapkan pemerintah akan sangat menentukan kualitas pelayanan publik dan kinerja keuangan yang

dihasilkan. Jika pemerintah bekerja dengan baik, orang akan mempercayainya (Fadilah & Andriani, 2025). Teori ini mengatakan bahwa akuntabilitas harus tersebar di berbagai tempat, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kemungkinan penipuan. Sebagai agen, pemerintah daerah berkewajiban untuk memperhatikan serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, masyarakat sebagai prinsipal tidak selalu memiliki keyakinan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, partisipasi dan umpan balik dari masyarakat diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi serta meningkatkan akuntabilitas dalam hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat (Putri & Amanah, 2020).

Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur periode 2020 – 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat -2,33% dan mulai menunjukkan tanda perbaikan pada tahun 2021 dengan angka 3,56%, menandai awal pemulihan dari pandemi. Situasi tersebut memberi rintangan khusus untuk otoritas daerah di Jawa Timur saat mengatur finansial daerah, yaitu seperti usaha guna menambah pendapatan asli daerah, mengelola belanja modal dengan efisien, juga menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi. Di bawah ini adalah grafik pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2021 hingga 2024 yang diambil dari data Badan Pusat Statistik.

Gambar 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur



Sumber : Diolah oleh peneliti, 2025

Dari gambar tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terdapat pada angka 3.56% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan permulaan proses perbaikan ekonomi setelah terpengaruh oleh pandemi COVID-19 di tahun yang terdahulu. Di periode 2022, timbul peningkatan pertumbuhan ekonomi senilai 5,34% sehingga mengindikasikan tahap perbaikan ekonomi yang kokoh setelah pandemi. Selanjutnya, periode 2023 terdapat pengurangan yang tidak banyak menjadi 4,95%. Pada periode 2024 pun terjadi pengurangan, tetapi dalam kategori stabil pada pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,93%.

Permasalahan yang terjadi selanjutnya yaitu ketidakstabilan alokasi belanja modal pada daerah Jawa Timur dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (2023) pada tahun 2020 Belanja Modal pada Jawa Timur mengalami penurunan yang cukup tinggi dikarenakan adanya pandemi sehingga perekonomian dan pembangunan di Jawa Timur melambat. Belanja modal berkontribusi besar guna meningkatkan kesejahteraan juga kemakmuran rakyat di wilayah itu. Rata-rata belanja modal di Jawa Timur dari 2019-2022, cenderung tidak stabil, bahkan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019 belanja modal di Jawa Timur sebesar Rp 2.770.973.973.023,11. Periode 2019 ke 2020 mengalami pengurangan yang cukup besar yaitu periode 2020 sebesar Rp

1.904.556.949.359,00 adanya penurunan Belanja Modal pada tahun 2020 terutama disebabkan oleh adanya pandemi yang mendorong alokasi dana untuk lebih difokuskan pada belanja rutin guna memberikan bantuan kepada masyarakat. Dampak dari pandemi secara signifikan memengaruhi anggaran Belanja Modal, yang sebelumnya hanya mengalami penurunan yang terbatas pada 2020. Saat periode 2021 muncul sedikit penambahan pada belanja modal di Jawa Timur sebesar Rp 1.969.920.805.338,69 dari Rp 1.904.556.949.359,00. Ditahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup besar pada belanja modal di Jawa Timur sebesar Rp 2.505.994.499.065,62 dikarenakan terjadi pemulihan ekonomi setelah masa-masa sulit yang disebabkan oleh pandemi. Hal ini disebabkan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna memulihkan ekonomi pasca pandemi, peningkatan pendanaan pada program konstruksi, serta perencanaan strategis guna meningkatkan daya saing ekonomi dan menambah kondisi kehidupan publik.

Belanja modal adalah satu diantara beberapa elemen yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan daerah. Wahyudin & Hastuti (2020) menyebutkan jika belanja modal merupakan potensi permanen yang didapatkan dan diarahkan oleh otoritas dengan biaya dan finansial dari sebuah perkiraan. Kondisi tersebut mencerminkan kinerja suatu wilayah dalam konteks pembangunan. Belanja modal dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Besarnya belanja modal menunjukkan tingkat pembangunan aset daerah yang dilakukan pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang memadai berharap bisa menambah mutu fasilitas umum, yang dimana akan turut mendukung perbaikan kinerja pemerintah daerah (Sari & Aztisya, 2022). Kondisi ini membuktikan bahwa kinerja keuangan daerah untuk menyediakan infrastruktur yang efektif dan menciptakan efisiensi di berbagai sektor terkait meningkat seiring dengan belanja modal. Dengan demikian, produktivitas masyarakat meningkat, yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan.

Pengaruh belanja modal kepada kinerja keuangan daerah didasarkan pada temuan Burhan *et al.* (2022) menjelaskan adanya peningkatan alokasi belanja modal dari pemerintah daerah bisa memberikan kontribusi kepada perbaikan kinerja finansial daerah. Temuan itu selaras dengan Simamora & Budiwitjaksono (2022); dan Sari & Aztisya (2022) mengindikasikan jika kinerja keuangan daerah memberi pengaruhnya kepada tingkat belanja modal. Tetapi, hasil tersebut bertolak belakang dengan studi Zamzami & Rakhman (2023) membuktikan bahwa dalam jangka pendek, peningkatan belanja modal berpotensi menurunkan kinerja keuangan daerah untuk sementara waktu. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan belanja modal sering memberikan masalah ketika dihubungkan melalui praktik-praktik kecurangan, terutama pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di lingkup pemerintah daerah.

Mardiasmo (2004) mendefinisikan pendapatan asli daerah sebagai pemasukan yang datang dari potensi wilayah, yakni retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil pengelolaan perusahaan milik daerah, dan sumber pendapatan sah lainnya yang menjadi hak otoritas daerah. PAD menjadi indeks pokok guna mengukur tingkat kinerja serta kemandirian suatu wilayah pada saat manajemen finansial daerah tersebut. Berlandaskan aturan dari Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004, satu jenis sumber pendanaan untuk pembiayaan daerah tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan wilayah. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi penerimaan daerah, terutama melalui peningkatan pendapatan asli daerah selaku akar pendanaan utama. Bertambahnya PAD yang berhasil dihimpun, semakin kuat juga kemampuan daerah saat mendanai pengurusan lembaga untuk mendanai pengembangan tanpa harus menggantungkan distribusi anggaran dari otoritas pusat (Digdowiseiso *et al.*, 2022).

Pengaruh pendapatan asli daerah kepada kinerja keuangan daerah didukung oleh penelitian Fadilah & Andriani (2025); Agustina & Wardoyo (2024), Insani *et al.* (2023) menghasilkan PAD memberi pengaruhnya pada kinerja keuangan daerah. Temuan tersebut konsisten dengan studi Simamora

& Budiwitjaksono (2022) yang menyebutkan PAD memberi pengaruh kepada kinerja keuangan daerah. Tetapi, bertentangan oleh studi Andjarwati *et al.* (2021) menghasilkan bahwa PAD tidak terbukti memengaruhi kinerja keuangan.

Selain variabel lainnya, pertumbuhan ekonomi elemen yang juga berkontribusi kepada kinerja keuangan daerah sesuai observasi Nurhayati & Hamzah (2020) menyebutkan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kinerja keuangan daerah karena menjadi bahan penghasilan wilayah yang perlu didorong agar tumbuh. Diharapkan pemerintah daerah yang memiliki pendapatan tinggi dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan. Hal ini didukung juga oleh penelitian Ilmi (2023) mengungkapkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh perbaikan kinerja keuangan pemerintah. Tetapi, berbeda dengan studi Insani *et al.* (2023) dan Nasirwan *et al.* (2024) yaitu pertumbuhan ekonomi tidak memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan tidak bisa dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kenaikan atau penurunan kinerja keuangan daerah.

Partisipasi masyarakat diartikan dengan keikutsertaan aktif masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan evaluasi perubahan yang terjadi (Yaya & Sukardi, 2025). Hasil penelitian Yunita & Rasmini (2020); Fadilah & Andriani (2025) menghasilkan bahwa partisipasi masyarakat memperkuat dampak PAD kepada kinerja keuangan serta keterlibatan masyarakat memperkuat dampak belanja modal kepada kinerja keuangan. Bertolak belakang dengan temuan Maulida'arifina (2024) menyatakan partisipasi masyarakat berperan sebagai variabel moderasi dengan memperlemah pengaruh PAD pada kinerja keuangan daerah. Sedangkan, keterlibatan masyarakat tidak terbukti mampu memoderasi interaksi dari belanja modal maupun pertumbuhan ekonomi pada kinerja keuangan.

Observasi tentang dampak kinerja keuangan daerah adalah tema yang krusial untuk diteliti, mengingat manajemen finansial daerah termasuk isu yang sensitif dan membutuhkan kajian mendalam. Penelitian oleh Andjarwati

et al. (2021) untuk memperkirakan variabel kinerja keuangan memiliki empat rasio, yakni “rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi”. Penelitian Fadilah & Andriani (2025) untuk menghitung kinerja keuangan menggunakan rasio efektivitas. Selain itu, studi Ardelia *et al.* (2022) guna mengevaluasi kinerja keuangan, tiga rasio digunakan: rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, dan rasio ketergantungan. Namun, penilaian kinerja keuangan otoritas daerah pada observasi ini didasarkan pada rasio kemandirian saja, karena digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pemerintah daerah mampu membiayai pelaksanaan kegiatan dan urusan pemerintahan (Runjung *et al.*, 2022).

Urgensi penelitian ini berada pada penggunaan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi dalam model penelitian. Kehadiran variabel tersebut memberikan kontribusi teoritis dan empiris karena keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan berkesempatan menguatkan dampak belanja modal pada kinerja keuangan daerah melalui pengawasan publik, peningkatan transparansi, serta penguatan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya partisipasi yang aktif, pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, responsif, dan bertanggung jawab. Di samping itu, partisipasi masyarakat juga mencerminkan peran warga dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya melalui kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan bertambahnya pungutan pajak dari rakyat, kontribusi mereka kepada penambahan kinerja otoritas daerah menjadi bertambah signifikan (Yunita & Rasmini, 2020). Studi ini meliputi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020 sampai 2024.

Berdasarkan berbagai fenomena yang terjadi, otoritas daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai objek observasi karena provinsi ini termasuk salah satu wilayah sebagai penyumbang perekonomian utama Indonesia sehingga kritis untuk dikaji tentang kinerja keuangan daerahnya. Selain itu, selama rentang waktu 2021 hingga 2024, Jawa Timur mengalami rintangan yang banyak karena adanya pandemi COVID-19

sehingga berpengaruh besar kepada ekonomi serta finansial daerah. Saat masa ini pun terjadi tahap perbaikan ekonomi setelah pandemi yang memerlukan manajemen finansial daerah yang efisien dan bijak (Soewardi *et al.*, 2023).

Oleh karena itu, Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu terus menambah tingkat pengelolaan finansial daerah sehingga kinerja keuangan daerah dapat menjadi tambah optimal daripada daerah lainnya. Keberadaan kekayaan alam serta sumber daya manusia yang beragam menjadikan Jawa Timur sebagai wilayah yang menarik untuk dikaji pada studi ini. Kemudian, tingginya tahap pelaksanaan desentralisasi di provinsi tersebut memberikan peluang untuk menganalisis secara lebih mendalam prosedur pemecahan masalah pada tingkatan daerah serta kemampuan otoritas daerah dalam mengendalikan dan memanfaatkan potensi kekayaan keuangan yang dimiliki.

Dari penjelasan diatas, peneliti antusias dalam melakukan penelitian **"Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Pemoderasi"**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang sudah dijabarkan tersebut, disimpulkan rumusan masalah pada observasi ini adalah:

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang telah disusun, dapat disimpulkan tujuan observasi ini adalah:

1. Untuk memahami pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk memahami pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk memahami pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk memahami pengaruh partisipasi masyarakat memoderasi hubungan antara belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk memahami pengaruh partisipasi masyarakat memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6. Untuk memahami pengaruh partisipasi masyarakat memoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Observasi ini diharapkan bisa membagikan beberapa kegunaan antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Observasi ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman tentang dampak belanja modal, PAD, dan pertumbuhan ekonomi pada kinerja keuangan daerah, dan menjelaskan peran keterlibatan masyarakat ketika memberi pengaruhnya saat interaksi antara belanja modal, PAD, dan pertumbuhan ekonomi kepada kinerja keuangan.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Observasi ini memberikan manfaat bagi media pengembangan pengetahuan dan pemahaman pada bidang *accounting*, terutama terkait analisis dampak belanja modal, PAD, dan pertumbuhan ekonomi kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, melalui penerapan moderasi partisipasi masyarakat, peneliti dapat memperluas kemampuan analisis empiris menggunakan metode regresi data panel dan analisis regresi moderasi

(MRA). Penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk studi lanjutan yang ingin menggali lebih dalam keterlibatan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Temuan ini bisa dipergunakan untuk alasan evaluasi untuk otoritas daerah saat merencanakan kebijakan yang sangat efektif dan akurat. Interpretasi mengenai elemen-elemen yang berdampak pada kinerja keuangan diharapkan dapat membantu optimalisasi belanja modal dan peningkatan PAD. Selain itu, keterlibatan masyarakat sebagai moderasi memberikan masukan penting agar pemerintah lebih terbuka dan partisipatif dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, sehingga tercipta tata keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

3) Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) atau BPPKAD

Lembaga teknis pengelola keuangan daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merumuskan strategi peningkatan kinerja keuangan melalui pendekatan berbasis data dan partisipatif. Penelitian ini memberi gambaran tentang pentingnya pengelolaan anggaran yang tidak hanya pada jumlah belanja atau penerimaan, tetapi juga pada efektivitas penggunaannya dan pelibatan dalam prosesnya.

4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini menyadarkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat saat tindakan pemecahan masalah, khususnya saat perencanaan serta pengamatan anggaran daerah. Dengan ikut serta dalam musyawarah pembangunan dan mendukung kebijakan melalui kepatuhan membayar pajak, masyarakat berperan langsung dalam peningkatan kinerja finansial daerah.

1.5 Batasan Penelitian

1. Observasi ini terbatas pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang menyediakan data Laporan Realisasi APBD melalui portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data rentan waktu 2020 sampai dengan 2024.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian selanjutnya akan begitu diuntungkan dengan petunjuk dan landasan yang sudah diberikan dari temuan-temuan yang sudah ada, yang mendukung penulis dalam mengembangkan kerangka konseptual yang diharapkan. Terdapat studi terdahulu mengenai isu pada observasi ini. Dibawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan studi ini:

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator Penelitian	Metode dan Analisis Data	Hasil penelitian
1.	Addini Fitri Fadilah dan Sri Andriani (2025) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan	Independen/ Bebas : Pendapatan Asli Daerah (X1) Belanja Modal (X2) Dana Perimbangan (X3) Dependen/ Terikat : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Kuantitatif Analisis regresi data panel menggunakan model FEM dari hasil uji Chow dan Hausman.	PAD dan belanja modal memberikan dampak pada kinerja keuangan daerah. Sementara itu, dana perimbangan tidak memiliki pengaruh. Kemudian, partisipasi masyarakat mampu

	Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi	Moderasi : Partisipasi Masyarakat (Z)		memoderasi dampak PAD, belanja modal, dan dana perimbangan dengan kinerja keuangan.
2.	Rizal Yaya dan Sukardi (2025) Pengaruh Implementasi <i>E-Government</i> dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dengan <i>Good Government Governance</i> sebagai Variabel Pemoderasi	Independen/ Bebas : Implementasi <i>E-Government</i> (X1) Partisipasi Masyarakat (X2) Dependen/ Terikat : Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Y) Moderasi : <i>Good Government Governance</i> (Z)	Kuantitatif Analisis data dilakukan menggunakan SEM-PLS melalui perangkat lunak SmartPLS versi 4. SEM-PLS	Penerapan <i>e-government</i> maupun partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah desa. Selain itu, <i>good government governance</i> terbukti mampu memperkuat pengaruh <i>e-government</i> terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, pengaruh

				moderasi <i>good government governance</i> tidak terbukti signifikan dalam memperkuat hubungan antara partisipasi masyarakat dan kinerja pemerintah desa.
3.	Dila Salsa Agustina dan Dwi Urip Wardoyo (2024) <i>Effectiveness of Financial Performance of Provincial Governments in Indonesia: Evidence During Covid-19</i>	Independen/ Bebas : Belanja Modal (X1) Pendapatan Asli Daerah (X2) Dana Perimbangan (X3) Dependen/ Terikat : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Kuantitatif Analisis regresi data panel sebagai metode analisis data	Hasil penelitian menunjukkan pada dua periode tersebut PAD memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, dana perimbangan hanya memiliki pengaruh yang signifikan pada masa awal COVID-19. Belanja modal memberi

				pengaruhnya yang negatif dan tidak signifikan pada kinerja keuangan pada masa awal dan peralihan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang dampak COVID-19 pada kinerja keuangan di Indonesia.
4	Nasirwan, Aisah Br Ginting, Christina Manalu, Desy Amelia Sinaga (2024) <i>The Influence of Local Government Size and Economic Growth on Local Government</i>	Independen/ Bebas : Ukuran Pemerintah Daerah (X1) Pertumbuhan Ekonomi (X2) Dependen/ Terikat : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Kuantitatif Analisis regresi data panel	Temuan ini menghasilkan ukuran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai dampak pada kinerja keuangan.

	<i>Financial Performance</i>			
5.	Faiz Zamzami dan Fuad Rakhman (2023) <i>Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia</i>	Independen/ Bebas : Ukuran Daerah (X1) Belanja Modal (X2) Kualitas Pelaporan Keuangan (X3) Rekomendasi Audit (X4) Masalah Cakrawala (X5) Dependen/ Terikat : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Kuantitatif Analisis regresi data panel untuk menguji hipotesis.	Ukuran pemerintah daerah, kualitas pelaporan keuangan, dan rekomendasi audit memberikan dampaknya yang positif pada kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, belanja modal memberikan dampaknya yang negatif pada kinerja keuangan.
6.	Amin Insani, Sri Rahayu dan Misni Erwati (2023) Determinan Kinerja Keuangan	Independen/ Bebas : Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Perimbangan (X2) Belanja Modal (X3)	Kuantitatif Analisis regresi linear berganda.	Temuan studi menunjukkan PAD memberikan dampak positif pada kinerja keuangan daerah dan dana perimbangan memberi

	Pemerintah Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (X4) Opini Audit (X5) Dependen/ Terikat : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)		pengaruh negatif pada kinerja keuangan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi, opini audit, dan belanja modal tidak terbukti memberi pengaruh kepada kinerja keuangan.
7.	Irna Triannur Lubis, Etty Harya Ningsi (2022) <i>Determinants Of Financial Performance In Local Governments In District/City In Indonesia</i>	Independen/ Bebas : Ukuran Pemerintah (X1) Dana Perimbangan (X2) Pertumbuhan Ekonomi (X3) Dependen/ Terikat : Kinerja Keuangan Daerah	Kuantitatif Analisis regresi sederhana.	Temuan menghasilkan Ukuran Pemerintah memiliki dampak positif, Dana Perimbangan memiliki dampak negatif, dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki dampak negatif terhadap Kinerja Keuangan.
8.	Maya Sari dan Arum Aztisya (2022)	Independen/ Bebas : Pendapatan Asli Daerah (X1)	Kuantitatif Analisis regresi linier berganda	Temuan observasi menghasilkan yaitu secara

	<i>Determinants of Local Government Financial Performance</i>	Dana Perimbangan (X2) Belanja Modal (X3) Dependen/ Terikat : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)		bersamaan variabel PAD, dana perimbangan, dan belanja modal memberi pengaruh yang signifikan kepada kinerja keuangan di Provinsi Sumatera Utara.
9.	Winanda Chyntia Simamora dan Gideon Setyo Budiwitjaksono (2022) Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada	Independen/ Bebas : Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2) Belanja Modal (X3) Dependen/ Terikat : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Kuantitatif Metode menganalisis data yang dipakai di kegiatan meneliti ini yaitu uji regresi linear berganda	Penelitian ini mengungkapkan yaitu PAD dan belanja modal terbukti mempengaruhi kinerja keuangan. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada kinerja keuangan.

	Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018- 2020			
10.	Ika Novita Ardelia, Hilda Kumala Wulandari, Yenny Ernitawati, Dan Dumadi (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-	Independen/ Bebas : Pendapatan Asli Daerah (X1) Belanja Modal (X2) Dana Perimbangan (X3) Dependen/ Terikat : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Kuantitatif Analisis regresi menggunakan SPSS versi 25 untuk mengolah data.	Temuan penelitian menghasilkan yaitu kinerja keuangan dipengaruhi PAD dan dana perimbangan. Akan tetapi, belanja modal tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan. Hasil uji simultan lebih lanjut mengungkapkan bahwa PAD, belanja modal, dan dana perimbangan secara bersama- sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

	2020)			keuangan.
11.	Mahardika Burhan, Kartini, dan Darwis Said (2022) Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi	Independen/ Bebas : Kemandirian Keuangan (X1) Belanja Modal (X2) Dependen/ Terikat : Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Y) Moderasi : Pertumbuhan Ekonomi (Z)	Kuantitatif Analisis statistik deskriptif.	Kemandirian keuangan dan belanja modal memberi pengaruh yang positif kepada kinerja keuangan. Kemudian, interaksi antara kemandirian keuangan dan pertumbuhan ekonomi bertanda positif dan signifikan pada kinerja keuangan daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak bisa memoderasi belanja modal pada kinerja keuangan.
12.	Tri Andjarwati, Endah Budiarti, Pramita Studiviany Soemadijo, dan	Independen/ Bebas : Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana	Kuantitatif Analisis regresi PLS dan program <i>software</i>	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diinterpretasikan memiliki

	Muhammad Yasin (2021) <i>Analysis of Local Own Revenue and Balancing Funds on the Financial Performance of Districts and Cities in the Region of East Java Province</i>	Perimbangan (X2) Dependen/ Terikat : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	versi 3.0 M3. PLS (Partial Least Square)	hubungan yang tidak signifikan dan negatif. Sedangkan, hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan menunjukkan arah positif.
13.	Putu Venny Yunita dan Ni Ketut Rasmini (2020) Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal pada Kinerja	Moderasi : Partisipasi Masyarakat Independen/ Bebas : Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Perimbangan (X2) Belanja Modal (X3) Dependen/ Terikat :	Kuantitatif Analisis data menggunakan <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan PAD dan belanja modal dapat mendorong perbaikan kinerja keuangan. Namun, dana perimbangan tidak menunjukkan pengaruh yang

	Keuangan	Kinerja Keuangan (Y)		signifikan terhadap kinerja keuangan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat memperkuat dampak PAD, dana perimbangan, serta belanja modal kepada kinerja keuangan.
--	----------	-------------------------	--	---

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

Studi terdahulu membuktikan dampak positif PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan. Namun, ditemukan pula beberapa hasil yang berbeda, seperti penelitian Zamzami & Rakhman (2023) serta Agustina & Wardoyo (2024) yang mengindikasikan belanja modal tidak selalu memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan, terutama ketika masa pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas belanja modal mengandalkan kondisi ekonomi serta efisiensi pengelolaan anggaran di tiap daerah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor moderasi, seperti partisipasi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, memiliki peran penting untuk memperkuat kaitan antar variabel utama. Temuan terdahulu oleh Yunita & Rasmini (2020) serta Fadilah & Andriani (2025) membuktikan bahwa partisipasi masyarakat mampu memperkuat dampak PAD dan belanja modal kepada kinerja keuangan daerah. Sementara itu, penelitian Burhan *et al.* (2022) mengindikasikan pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan antara kemandirian keuangan dan kinerja keuangan, tetapi tidak terhadap belanja modal. Perbedaan hasil ini menandakan perlunya analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi daerah serta tingkat partisipasi masyarakat pada pengendalian finansial publik.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, studi ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dengan fokus pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu 2020–2024. Wilayah ini memiliki karakteristik ekonomi yang beragam, dengan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat partisipasi masyarakat yang dinamis. Oleh karenanya, observasi ini berpotensi memberi kontribusi nyata dengan sangat kontekstual tentang bagaimana PAD, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi kinerja keuangan, dan bagaimana partisipasi masyarakat dapat memperkuat hubungan itu dalam konteks pasca-pandemi dan desentralisasi fiskal yang terus berkembang.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Berdasarkan pandangan Jensen *et al.* (1976), hubungan keagenan merupakan suatu bentuk komitmen antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal memberikan pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Dalam konteks ini, agen yang berperan sebagai manajer memiliki tanggung jawab moral untuk memaksimalkan kesejahteraan dan keuntungan pihak prinsipal. Namun demikian, agen juga cenderung memiliki kepentingan pribadi yang dapat mendorong mereka untuk mengutamakan kesejahteraan individu. Konsep teori keagenan memiliki relevansi bukan hanya sektor privat, namun bisa dipraktikkan di sektor publik. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, relasi keagenan terjadi dengan pemerintah selaku agen dan masyarakat selaku prinsipal, baik di tingkat nasional maupun lokal. Sebagaimana dijelaskan oleh Periansya *et al.* (2021), teori keagenan mengkaji interaksi antara pihak prinsipal yang memberikan wewenang dan pihak agen yang memiliki informasi yang tidak merata. Ketimpangan informasi tersebut, menurut Putri & Amanah (2020), berpotensi menimbulkan penyimpangan seperti penipuan atau praktik korupsi oleh agen. Oleh karena itu, teori keagenan berasumsi bahwa untuk meminimalisasi potensi penyimpangan tersebut, akuntabilitas perlu didistribusikan secara merata di berbagai tingkat pemerintahan guna menciptakan mekanisme *checks and*

balances yang efektif. Pemerintah daerah sebagai agen diharapkan mampu menyadari dan mengakomodasi kepentingan masyarakat, meskipun pada kenyataannya masyarakat belum tentu memiliki kepercayaan penuh terhadap kinerja pemerintah daerah. Partisipasi dan umpan balik masyarakat diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi serta memperkuat keseimbangan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan kewenangan setempat.

Berdasarkan teori keagenan, pemerintah daerah dipandang selaku agen yang bertugas menggantikan kepentingan masyarakat selaku prinsipal. Sebagai pihak yang diberikan mandat dan kepercayaan, agen memegang kewajiban dalam mengendalikan sumber daya publik dengan maksimal guna meningkatkan kesejahteraan serta pendapatan masyarakat selaku principal (Ardelia *et al.*, 2022). Peningkatan kualitas fasilitas publik serta ketentraman rakyat bisa diwujudkan melalui pemanfaatan potensi kekayaan yang dikuasai dengan tepat guna dan optimal, terutama pada tingkat pemerintahan kabupaten atau kota (Aulia & Rahmawaty, 2020). Berdasarkan teori keagenan, pemerintah diharuskan untuk menentukan pendekatan yang sesuai agar dapat memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat yang berfungsi sebagai prinsipal. Masyarakat memiliki harapan terhadap kinerja optimal pemerintah, yang tercermin melalui penyajian laporan keuangan yang transparan serta peningkatan mutu pelayanan publik (Fadilah & Andriani, 2025). Kualitas laporan keuangan dan layanan itu sangat ditentukan oleh kebijakan serta cara manajerial yang diadopsi otoritas daerah. Apabila pemerintah dapat membuktikan pencapaian dengan optimal dan transparan, bisa menambah keyakinan publik untuk pemerintah akan tumbuh.

2.2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pengertian kinerja dapat diartikan yakni capaian yang dihasilkan berdasarkan pelaksanaan suatu aktivitas atau agenda dengan pendayagunaan estimasi dana, melalui penilaian

berdasarkan aspek terukur maupun kualitas. Halim (2008) menegaskan kinerja keuangan suatu wilayah adalah salah satu indikator yang bisa dimanfaatkan sebagai evaluasi sejauh mana daerah dapat mengimplementasikan kemandirian. Di dalam lembaga otoritas daerah, evaluasi kinerja keuangan memanfaatkan analisis rasio dari data laporan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup akuntabilitas terkait pengelolaan APBD. Temuan ini bisa dijadikan acuan guna menganalisis kinerja finansial daerah pada pengendalian potensi finansial. (Sari & Aztisya, 2022).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 2 menegaskan yakni terciptanya manajemen keuangan daerah dengan baik bergantung pada pelaksanaan proses pengelolaan yang berlangsung secara berkesinambungan. Proses tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan daerah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika hasil yang diperoleh sejalan dengan yang direncanakan atau bahkan lebih baik, maka dapat diartikan bahwa performanya sangat memuaskan. Namun, apabila target tidak terlaksana sesuai rancangan atau kurang dari yang diharapkan, maka performanya kurang baik. (Charles Heston Runtunuwu, 2023).

2.2.3 Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mendefinisikan belanja modal sebagai penggunaan dana guna pengadaan serta peningkatan nilai aktiva tetap dan aktiva lainnya sehingga memberikan keuntungan jangka panjang, yaitu melebihi satu tahun buku (12 bulan), serta memenuhi ketentuan nilai pasar yang berlaku. Halim (2008) juga mendefinisikan belanja modal dengan pembelanjaan yang ditujukan sebagai perolehan aktiva tetap maupun aktiva lain-lain yang memiliki masa ekonomis melebihi satu siklus pelaporan. Ini berarti bahwa bisa dimanfaatkan dalam periode yang lama guna mendukung kegiatan

operasional, seperti pengeluaran modal untuk peralatan dan mesin, tanah, irigasi, jalan gedung dan bangunan, serta infrastruktur fisik yang lain.

Pemerintah setempat memanfaatkan belanja modal untuk mendirikan sarana publik, sistem informasi, serta prasarana guna memperbaiki pelayanan publik, yang pada gilirannya mendorong masyarakat untuk lebih sadar saat memenuhi kewajiban perpajakan serta pungutan daerah. (Zamzami & Rakhman, 2023). Peningkatan alokasi anggaran belanja modal oleh pemerintah daerah cenderung diikuti oleh membaiknya kinerja keuangan daerah. Kenaikan pengeluaran modal dari pemerintah daerah akan membantu meningkatkan fasilitas serta potensi daerah, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif atas pemasukan daerah dan memberi dukungan pencapaian kinerja finansial daerah yang maksimal (Insani *et al.*, 2023).

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah

Penjelasan dari Mardiasmo (2004) terkait pendapatan asli daerah yakni penghasilan yang diterima daerah dari beberapa pusat, seperti retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, hasil usaha milik daerah, dan pendapatan sah lainnya. Optimalisasi penerimaan PAD dapat dicapai melalui peningkatan kualitas dan efektivitas layanan masyarakat yang diberikan otoritas daerah. Eksploitasi pendapatan asli daerah yang berlebihan bisa menambah beban publik, berubah sebagai bentuk hukuman untuk wilayah, serta membahayakan makro ekonomi (Andjarwati *et al.*, 2021).

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 20 menjelaskan bahwa PAD terdiri atas penerimaan yang didapatkan dari retribusi daerah dan pajak daerah yang dikelola oleh pihak yang berwenang. Meningkatnya PAD yang didapatkan, makin meningkat juga kompetensi daerah dalam memenuhi tuntutan pembiayaannya secara mandiri, khususnya dalam kemandirian ekonomi sehingga daerah tersebut dapat dikatakan

memiliki pertumbuhan perekonomian yang baik (Saraswati & Utomo, 2023). Realisasi pendapatan daerah yang cukup strategis diikuti dengan peningkatan belanja daerah yang bersifat produktif dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah diberbagai sektor (Oktiani *et al.*, 2021).

2.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan peningkatan sistem keuangan dengan ditandai oleh meningkatnya produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan nasional riil bertambah. Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan meningkatkan infrastruktur, layanan kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan meningkatkan produksi di sektor jasa dan barang modal. Karena semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, kemungkinan besar negara tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Saad *et al.*, 2020).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas ekonomi yang dapat memiliki dampak baik maupun buruk. Ketika dalam suatu waktu perekonomian mengalami pertumbuhan yang baik, hal ini berarti aktivitas ekonominya meningkat, dan sebaliknya (Burhan *et al.*, 2022). Perkembangan ekonomi nasional diukur menggunakan *Produk Domestik Bruto* (PDB) yang bisa berfungsi untuk tolak ukur terhadap kecepatan perekonomian nasional yang berkaitan dengan efisiensi dari tingkat investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek yang sangat dinamis, termasuk asumsi teknologi, jumlah tenaga kerja, cadangan modal, pertumbuhan penduduk, dan jumlah pengangguran (Lubis & Ningsi, 2022).

2.2.6 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan pemerintahan yang berperan dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah, sehingga dapat meminimalkan potensi penyelewangan kekuasaan (Putra & Rasmini, 2019). Menciptakan estimasi dengan efisien memerlukan keterlibatan publik guna berpartisipasi pada estimasi belanja dan pendapatan daerah serta ikut mengawasi semua kebijakan pemerintah di lapangan. Yunita & Rasmini (2020) menekankan jika masyarakat terlibat secara aktif dalam pembayaran pajak, hal ini menunjukkan mereka turut serta dalam pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah melalui peningkatan penerimaan daerah. Kontribusi tersebut diharapkan bisa memotivasi otoritas daerah agar terus menambahkan mutu kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.2.7 Kajian Islam Tentang Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan secara islam sudah diterapkan pada era Rasulullah, pengelolaan keuangan juga dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan prinsip islam tentang pengelolaan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama (Rohmad *et al.*, 2023).

Menurut ulama Islam klasik, seperti Abu Ubaid yang menulis kitab Al-Amwal, ungkapan yang digunakan olehnya mengenai ekonomi publik adalah “*sunuful amwaal allati yalihaa al-a’immah liirro’iyyah*”, yang artinya: “beberapa macam bentuk kekayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk rakyat” (Mukti, 2023). Dalam Islam sendiri konsep anggaran negara bisa menggunakan konsep baitulmaal dengan sistem *balanced budget* atau sistem pengeluaran dan pemasukan yang seimbang. Islam menekankan dalam pencapaian kesejahteraan yang bersumber pada pengelolaan keuangan harus

secara optimal, demi kebutuhan dan kemakmuran generasi yang berkesinambungan, meningkatkan kemaslahatan umat serta tidak boleh berlebihan.

Efisiensi dalam pengaturan anggaran negara merupakan prinsip yang krusial pada ekonomi syariah. Nabi Muhammad serta sahabat Umar bin Khattab dijadikan teladan yang sempurna dalam mengelola keuangan publik yang memberikan pengaruh yang signifikan dan berlangsung lama. Penerapan prinsip efisiensi dalam kebijakan publik dapat diamati pada distribusi zakat yang dilakukan secara terarah dan tepat sasaran. Dana zakat dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, menekan angka kemiskinan, serta merealisasikan tujuan sosial yang telah ditetapkan dalam Syariah. Oleh karena itu, adanya alokasi kekayaan mampu melimpahkan keuntungan yang optimal guna kemakmuran masyarakat (Fadilah & Andriani, 2025).

Satu diantara ayat Al-Qur'an menjelaskan kaidah pengelolaan dan pembagian harta berdasarkan syari'ah terdapat dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.”

Ayat ini mengandung prinsip fundamental dalam ekonomi Islam tentang distribusi kekayaan yang adil dan pencegahan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Dalam konteks Indonesia, ayat ini memberikan refleksi mendalam tentang kondisi ekonomi saat ini dan arah kebijakan yang

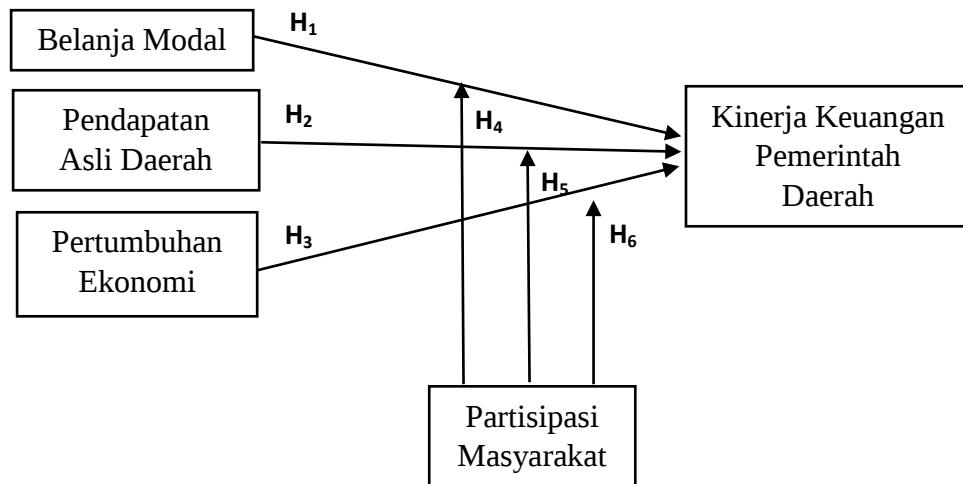
seharusnya ditempuh untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi. Menurut tafsir Ibn Kathir, ayat ini merujuk pada distribusi harta fai' (harta rampasan perang tanpa pertempuran) yang harus disalurkan dengan adil, tidak hanya kepada orang kaya. Tujuannya adalah mencegah penumpukan kekayaan oleh segelintir orang yang dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi (Falah, 2024).

Telah terdapat suatu mekanisme, sistem dan aturan di dalam syariat Islam yang turut memperhatikan permasalahan sosial termasuk kemiskinan yang terjadi di masyarakat, dimana sistem yang ada telah *built-in* dengan keseluruhan tatanan nilai dalam Islam. Prinsip-prinsip dari distribusi dalam Islam menurut Mahri *et al.* (2021) ialah: (1) Pendapatan yang diterima seseorang sangat bergantung pada usaha yang dilakukannya; (2) Terpenuhinya kebutuhan dasar yang merupakan hak setiap orang; (3) Harta tidak boleh berputar di tangan segelintir kelompok, yaitu kelompok super kaya; (4) Pada harta seseorang, terdapat bagian yang menjadi milik mutlak orang lain.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual observasi ini menjelaskan keterkaitan dari belanja modal, pendapatan asli daerah, serta perkembangan ekonomi terhadap kinerja finansial pemerintah daerah. Di samping itu, variabel yang memoderasi yang digunakan yakni partisipasi masyarakat, yaitu berfungsi untuk memperkuat atau melemahkan dampak dari ketiga variabel tersebut pada kinerja finansial pemerintah daerah. Adapun kerangka konseptual observasi ini dipaparkan dibawah ini.

Gambar 2. 2 Bagan Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Menurut Abdullah *et al.* (2022), hipotesis adalah jawaban dugaan sementara yang mengasumsikan solusi terhadap pertanyaan yang terdapat dalam penelitian., karena jawaban atas rumusan masalah dilakukan berdasarkan teori yang relevan dan logika berpikir belum dibuktikan berdasarkan fakta-fakta empiris. Berdasarkan rumusan masalah serta landasan teori yang sudah dipaparkan, maka hipotesis observasi bisa dijelaskan seperti dibawah ini:

2.4.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Studi oleh Suandani & Astawa (2021), belanja modal mengacu pada biaya dengan pelaksanaan guna menerima atau menambah aktiva tetap serta aktiva lainnya dengan umur ekonomis melebihi satu siklus pelaporan. Pada situasi pemerintahan wilayah, pengeluaran modal dipandang selaku pendanaan yang bertujuan mendistribusikan keuntungan jangka panjang melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Digdowiseiso *et al.* (2022) berpendapat bahwa semakin tinggi proporsi pengeluaran bagi belanja modal memperlihatkan loyalitas otoritas daerah guna mendukung pengembangan secara efektif. Aset yang dihasilkan dari belanja tersebut

dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Hasil penelitian Sari & Aztisya (2022) menyebutkan belanja modal memengaruhi kinerja keuangan daerah. Temuan itu selaras bersama studi Fadilah & Andriani (2025) yang menghasilkan belanja modal memengaruhi kinerja keuangan secara positif. Temuan serupa dari studi Simamora & Budiwitjaksono (2022) adanya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan. Maka dari itu, hipotesis yang diuraikan, yaitu:

H1 = Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah bisa didefinisikan yakni seluruh penghasilan yang didapatkan otoritas daerah melalui beberapa sumber pada kewasannya dengan pengelolaannya dilakukan mengikuti peraturan yang ditetapkan (Oktiani *et al.*, 2021). Berdasarkan jenisnya, PAD terdiri atas penerimaan yang datang dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, pajak daerah, serta berbagai sumber pendapatan lain yang diakui secara sah. Sejalan dengan penelitian Dwigantara & Handayani (2020) kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam mendanai berbagai aktivitas pemerintahan memberi partisipasi kepada penambahan kinerja finansial daerah. Kenaikan penerimaan daerah mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan dalam mendorong pembangunan, sehingga daerah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat (Amanda & Praptoyo, 2023).

Ardelia *et al.* (2022) menegaskan PAD berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Temuan studi Yunita & Rasmini (2020) juga menegaskan PAD memberi pengaruhnya yang positif pada kinerja keuangan daerah. Kemudian, PAD juga mempunyai dampak yang signifikan pada kinerja keuangan daerah berdasarkan hasil studi

(Digdowiseiso *et al.*, 2022). Berdasarkan berbagai temuan tersebut, hipotesis bisa dirumuskan seperti dibawah:

H2 = Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Definisi pertumbuhan ekonomi yaitu mekanisme pengembangan produktivitas sebuah perekonomian secara berkelanjutan dari masa ke masa guna mewujudkan tahap pendapatan perolehan yang semakin besar dan untuk mengetahuinya harus dibandingkan dengan tingkat pendapatan nasional dari tahun ke tahun (Arifin *et al.*, 2020). Otoritas daerah yang memegang pendapatan tinggi diharapkan memiliki kinerja yang baik. Jadi, menurut (Nurhayati & Hamzah, 2020) dapat dinyatakan jika bertambahnya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, bertambah juga kinerja finansial otoritas daerah yang dapat dicapai. Dapat disimpulkan melalui peningkatan PDRB dengan pembuktian berkembangnya aktivitas ekonomi daerah setiap tahunnya, diukur dengan harga konstan, merupakan indikator pertumbuhan ekonomi secara makro.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Panggabean (2017) mengindikasikan pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak kepada kinerja keuangan daerah. Studi Ilmi (2023) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak pada kualitas kinerja keuangan. Selain itu, temuan dari Nurhayati & Hamzah (2020) menyatakan pertumbuhan ekonomi memengaruhi kinerja keuangan. Dari uraian tersebut, sehingga hipotesis bisa dinyatakan:

H3 = Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.4.4 Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan giat masyarakat pada mekanisme pengidentifikasian masalah, pemecahan masalah, pelaksanaan

upaya mengatasi masalah, dan evaluasi perubahan yang terjadi (Yaya & Sukardi, 2025). Pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai. Dalam hal ini, belanja modal menjadi instrumen penting yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan aset-aset tersebut. Banyak infrastruktur dan sarana yang telah dibangun dengan baik adalah bukti dari tingginya belanja modal. Dengan demikian, peningkatan pembangunan di suatu daerah dapat mendorong perbaikan kinerja finansial otoritas daerah. Secara konseptual, bertambahnya potensi daya produktif yang tersedia, semakin besar pula hasil atau manfaat ekonomi yang dapat diperoleh (Yunita & Rasmini, 2020). Keterlibatan aktif masyarakat saat penyetoran pajak daerah memberikan tambahan pusat pendapatan untuk pemerintah daerah sehingga pelaksanaan belanja modal dapat didukung secara lebih optimal.

Hasil penelitian Yunita & Rasmini (2020) partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh belanja modal kepada kinerja keuangan daerah. lainnya menunjukkan partisipasi masyarakat dapat memoderasi pengaruhnya pada belanja modal dan kinerja keuangan (Fadilah & Andriani, 2025). Dengan berpartisipasi, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan penghasilan mereka. Penghasilan ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk menambah belanja modal, meningkatkan kinerja keuangan. Dari paparan diatas, hipotesis dapat diuraikan:

H4 = Partisipasi masyarakat dapat memperkuat pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.4.5 Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya PAD yang berhasil dihimpun. Dengan demikian, upaya untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber PAD perlu terus dilakukan agar kemampuan keuangan daerah semakin meningkat (Ayu, 2018). Partisipasi masyarakat melalui kepatuhan dalam membayar pajak daerah berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pemerintah daerah. Peningkatan

penerimaan tersebut akan berdampak pada bertambahnya PAD, sehingga kemampuan wilayah guna membiayai pelaksanaan desentralisasi secara mandiri menjadi lebih baik. Oleh karena itu, semakin tinggi PAD yang diperoleh dan semakin besar keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka semakin besar pula peluang peningkatan kinerja keuangan daerah (Yunita & Rasmini, 2020).

Temua oleh Maulida'arifina (2024) mengindikasikan keterlibatan masyarakat memoderasi yaitu memperlemah efek PAD pada kinerja keuangan daerah. Studi lain menjelaskan keterlibatan masyarakat memperkuat efek PAD terhadap kinerja keuangan daerah (Yunita & Rasmini, 2020). Selain itu, temuan dari Fadilah & Andriani (2025) pun mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat memoderasi pengaruhnya dari PAD kepada kinerja keuangan. Dari uraian tersebut hipotesisnya dibawah ini:

H5 = Partisipasi masyarakat dapat memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.4.6 Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam mengembangkan aktivitas ekonominya dan menjadi salah satu ukuran prospek pembangunan daerah. Berkembangnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai, bertambah juga peluang peningkatan penerimaan daerah sehingga berakibat dapat memperbaiki kinerja finansial otoritas daerah (Setiani & Ismunawan, 2022). Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu berhubungan langsung dengan kinerja keuangan daerah. Pada sebagian keadaan, wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat belum tentu memiliki kondisi finansial yang sehat. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh rendahnya keterlibatan masyarakat saat tahapan perancangan, penerapan, dan pengendalian anggaran daerah. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan alokasi anggaran yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata penduduk (Maulida'arifina, 2024).

Hasil penelitian Maulida'arifina (2024) partisipasi masyarakat tidak bisa memoderasi dampak pertumbuhan ekonomi pada kinerja keuangan daerah. Dari uraian tersebut, sehingga dihipotesiskan seperti dibawah ini:

H6 = Partisipasi masyarakat dapat memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis data pada observasi ini adalah data kuantitatif. Studi kuantitatif yakni jenis penelitian ilmiah yang dilakukan secara terstruktur untuk mengamati bagian-bagian, fenomena, serta hubungan sebab-akibat di antaranya. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap peristiwa yang menyatukan informasi yang bisa dihitung dengan melakukan metode statistik, matematika atau komputasi (Abdullah *et al.*, 2022). Observasi ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi. Data sekunder dalam studi ini didapatkan dari berbagai dokumen dan sumber informasi yang telah tersedia sebelumnya. Sumber data yang dipakai berupa laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Seluruh data itu diakses menggunakan portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yaitu <https://djpk.kemenkeu.go.id>, serta dari portal resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

3.2 Lokasi Penelitian

Studi ini dilaksanakan dengan menggunakan informasi sekunder yang didapatkan dari portal resmi DJPK melalui situs <https://djpk.kemenkeu.go.id/>, serta dari website resmi BPS setiap daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Data yang dianalisis mencakup laporan pelaksanaan APBD dan PDRB dari pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu tahun 2020 sampai 2024.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Definisi populasi yakni seperangkat analisis (element) lengkap yang sedang dipelajari/diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan darinya (Muin,

2023). Penelitian ini mengambil fokus pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, yang menyediakan laporan tentang RAPBD (Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada 2020 hingga 2024.

3.3.2 Sampel

Sampel harus benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi, artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi (Hardani *et al.*, 2020). Sampel pada observasi tersebut diperoleh dari 38 data yang digabungkan dalam waktu lima periode, dan menghasilkan 190 penarikan sampel.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling jenuh yang digunakan untuk teknik pengambilan sampel, yakni cara menentukan sampel dengan menggunakan seluruh bagian populasi dijadikan sampel. Sampel jenuh juga disebut sensus, yaitu ketika semua anggota populasi merupakan sampel (Sugiyono, 2013).

Tabel 3. 1 Sampel Penelitian

No.	Nama Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
1.	Kabupaten Pacitan
2.	Kabupaten Ponorogo
2.	Kabupaten Trenggalek
4.	Kabupaten Tulungagung
5.	Kabupaten Blitar
6.	Kabupaten Kediri
7.	Kabupaten Malang
8.	Kabupaten Lumajang
9.	Kabupaten Jember
10.	Kabupaten Banyuwangi
11.	Kabupaten Bondowoso
12.	Kabupaten Situbondo
13.	Kabupaten Probolinggo
14.	Kabupaten Pasuruan

15.	Kabupaten Sidoarjo
16.	Kabupaten Mojokerto
17.	Kabupaten Jombang
18.	Kabupaten Nganjuk
19.	Kabupaten Madiun
20.	Kabupaten Magetan
21.	Kabupaten Ngawi
22.	Kabupaten Bojonegoro
23.	Kabupaten Tuban
24.	Kabupaten Lamongan
25.	Kabupaten Gresik
26.	Kabupaten Bangkalan
27.	Kabupaten Sampang
28.	Kabupaten Pamekasan
29.	Kabupaten Sumenep
30.	Kota Kediri
31.	Kota Blitar
32.	Kota Malang
33.	Kota Probolinggo
34.	Kota Pasuruan
35.	Kota Mojokerto
36.	Kota Madiun
37.	Kota Surabaya
38.	Kota Batu

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

3.5 Data dan Jenis Data

Data sekunder merupakan jenis data yang dimanfaatkan pada studi ini. Data sekunder yang digunakan berasal dari laporan tentang realisasi anggaran yang terdapat dalam data APBD 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, periode 2020 hingga tahun 2024. Sumber data sekunder yang digunakan

berasal dari portal resmi DJPK, yaitu <https://djpk.kemenkeu.go.id> dan situs resmi BPS Jawa Timur yakni <https://jatim.bps.go.id>.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang digunakan studi ini. Dengan cara dokumentasi proses mengambil data yang sudah ada dalam bentuk dokumen-dokumen (Hardani *et al.*, 2020). Dokumen yang dikumpulkan adalah laporan tentang realisasi anggaran APBD dari kabupaten dan kota di Jawa Timur periode 2020 - 2024. Sumber data tersebut berasal dari portal resmi DJPK yakni <https://djpk.kemenkeu.go.id>., situs resmi BPS Jawa Timur yakni <https://jatim.bps.go.id>. Dokumen yang telah dikumpulkan nantinya akan dianalisis untuk mencapai tujuan observasi.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian yakni hal yang ditentukan peneliti guna diteliti, dalam bentuk apa pun, agar dapat diperoleh informasi mengenainya, lalu diambil kesimpulan berdasarkan informasi tersebut (Sugiyono, 2013). Berbagai jenis variabel pada observasi dapat bervariasi. Berikut beberapa variabel pada yang digunakan.

3.7.1 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat merupakan variabel yang secara struktur berpikir keilmuan menjadi variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel lainnya (Hardani *et al.*, 2020). Kinerja keuangan menjadi variabel yang bergantung pada observasi ini.

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penilaian tentang kemampuan finansial daerah dilakukan dengan menganalisis beberapa rasio keuangan yang diambil dari laporan APBD. Sebagai evaluasi kinerja otoritas daerah, salah satu cara dengan analisis rasio keuangan. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) merupakan rasio yang digunakan, sebagai media pengukur dan penunjuk dalam menilai kinerja keuangan otoritas daerah (Prasetiawati & Winarsih, 2025). RKKD adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu

membiayai pelaksanaan kegiatan dan urusan pemerintahan. Berikut cara menghitung rasio kemandirian keuangan (Mahmudi, 2018):

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

3.7.2 Variabel Bebas (Independen)

Jika dalam penelitian terdapat dua variabel yang saling berkaitan, di mana terjadi perubahan pada satu variabel karena pengaruh perubahan variabel lainnya, maka variabel yang menyebabkan perubahan tersebut disebut variabel bebas (Muin, 2023). Variabel independent dalam observasi ini yaitu belanja modal, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi.

1. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mendefinisikan belanja modal sebagai beban yang dilakukan pemerintah guna memperoleh aktiva tetap selama jangka waktu yang lama. Termasuk dalam belanja tersebut adalah pembelian tanah, bangunan, jalan, alat berat, dan sistem irigasi. Pada observasi ini, pengukuran belanja modal mengacu dengan pendekatan (Yunita & Rasmini, 2020):

Belanja modal = belanja tanah + belanja peralatan dan mesin + belanja gedung dan bangunan + belanja jalan, irigasi, dan jaringan + belanja aktiva tetap yang lain.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang datang dari kekayaan perniagaan lokal, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah, pajak daerah, retribusi, serta pendapatan sah yang lain. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, PAD didefinisikan aliran penghasilan yang ditarik menurut ketentuan hukum dan dikelola oleh daerah itu sendiri. Metode perhitungannya (Budiana & Rahayu, 2021):

PAD = hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + retribusi daerah + pajak daerah + pendapatan sah yang lain.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat menggunakan PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*), yaitu PDRB riil. Pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan PDRB riil (harga konstan) akan menunjukkan pertumbuhan hasil produksi secara nyata, karena PDRB riil sudah memperhitungkan pengaruh inflasi. Suatu daerah mempunyai banyak potensi serta mampu mengelola sumber daya tersebut dengan baik, menunjukkan peningkatan PDRB sehingga akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita secara nyata. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan kinerja keuangan daerah (Setiani & Ismunawan, 2022). Pertumbuhan ekonomi ini akan diukur melalui rumus dibawah ini (Rinova & Dewi, 2021):

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

3.7.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi yakni memengaruhi dampak variabel bebas dan variabel terikat, dengan cara memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut (Hildawati *et al.*, 2024). Dalam studi ini, partisipasi masyarakat digunakan untuk variabel moderasi.

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat bisa dilihat dari kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak dan keterlibatan dalam musrenbang atau forum publik lainnya. Dengan teratur membayar pajak, masyarakat berkontribusi pada dukungan keuangan bagi kegiatan pemerintah daerah. Dalam kerangka pemerintahan yang baik, masyarakat bersama pemerintah memiliki tanggung jawab yang seimbang serta timbal balik membantu membuat otoritas yang efisien serta tentram. Kewajiban otoritas daerah yaitu mengoptimalkan potensinya saat mengendalikan finansial daerah dengan memotivasi peningkatan PAD (Fadilah & Andriani, 2025). Berikut adalah cara untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat (Yunita & Rasmini, 2020) :

$$PM = \frac{PDt1 - PDt0}{PDt0}$$

PM = Partisipasi Masyarakat

PD_{t1} = Pendapatan daerah tahun saat ini

PD_{t0} = Pendapatan daerah tahun sebelumnya

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator Pengukuran	Skala	Sumber
Dependen (Y)				
1.	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$	Rasio	(Mahmudi, 2018)
Independen (X)				
2.	Belanja Modal	Belanja modal = belanja peralatan dan mesin + belanja tanah + belanja jalan, irigasi, dan jaringan + belanja gedung dan bangunan + belanja aset tetap lainnya	Rasio	(Yunita & Rasmini, 2020)
3.	Pendapatan Asli Daerah	PAD = pajak daerah + hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + retribusi daerah + pendapatan lain yang sah	Rasio	(Budiana & Rahayu, 2021)
4.	Pertumbuhan Ekonomi	$PE = \frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} \times 100\%$	Rasio	(Rinova & Dewi, 2021)
Moderasi (Z)				
5.	Partisipasi Masyarakat	$PM = \frac{PD_{t1} - PD_{t0}}{PD_{t0}}$ PM = Partisipasi Masyarakat PD _{t1} = Pendapatan daerah	Rasio	(Yunita & Rasmini, 2020)

		tahun saat ini PD_{t0} = Pendapatan daerah tahun sebelumnya		
--	--	---	--	--

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

3.8 Analisis Data

Observasi ini menggunakan beberapa teknik analisis data yakni uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta uji *Moderated Regression Analysis* (MRA). Proses pengolahan data dilakukan dengan *software Eviews12*. Berikut analisis data lainnya yang digunakan, yaitu:

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu jenis metrik yang dimanfaatkan guna mengkaji data dengan cara menggambarkan serta menjelaskan langsung data yang sudah dikumpulkan, tidak perlu mencoba membuat ringkasan atau generalisasi sesuai ketentuan untuk kelompok yang lebih luas (Muin, 2023). Teknik ini akan memberi deskripsi awal untuk setiap variabel dalam penelitian. Di mana pada gambaran data tersebut, setiap variabelnya bisa ditunjukkan dari nilai rata-rata, maksimum dan minimum, serta standar deviasi (Abdullah *et al.*, 2022).

3.8.2 Analisis Pemilihan Model

Kemungkinan nilai intercept dan slope regresi data panel berbeda dari korporasi serta masa waktu yang berbeda. Anwar & Nursan (2025) mengemukakan bahwa analisis data panel diawali dengan mengestimasi 3 model, yakni:

1. CEM (*Common Effect Model*). Teknik *Ordinary Least Square* (OLS) yang digunakan yakni dengan mengkombinasikan informasi berupa runtun waktu dan data lintas sektor tanpa memperhatikan perbedaan di antara waktu dan individu.
2. FEM (*Fixed Effect Model*). Model ini menggunakan pendekatan intersep, yaitu terjadi karena setiap entitas pada intersep tidak bervariasi disepanjang waktu.

3. REM (*Random Effect Model*). REM atau disebut juga *error component model* (ECM) menggunakan pendekatan *error term*, yaitu karena komponen errornya terdiri atas lebih dari satu.

Ada tiga uji yang digunakan dalam pemilihan metode estimasi data panel, yaitu :

1. Uji Chow, guna menetapkan antara model CEM atau FEM yang layak untuk dipakai pada observasi. Hipotesis uji chow yakni:
 H_0 = Model CEM yang diterima ketika skor prob *Chi-square* > 0,05
 H_1 = Model FEM diterima apabila probabilitas *Chi-square* < 0,05
2. Uji Hausman, dipakai untuk menentukan FEM atau REM yang layak dipakai pada observasi. Adapun hipotesis uji hausman yaitu:
 H_0 = Model REM yang diterima ketika nilai prob *Chi-square* > 0,05
 H_1 = Model FEM yang diterima apabila probabilitas *Chi-square* < 0,05
3. Uji *Langrange Multiplier* (LM). Metode ini digunakan sebagai menentukan bagaimana model REM akan didahulukan dibandingkan CEM. Adapun hipotesis uji *Langrange Multiplier* yaitu sebagai berikut :
 H_0 = Model CEM yang diterima jika skor prob *Breusch Pagan* > 0,05
 H_1 = Model REM yang diterima jika skor prob *Breusch Pagan* < 0,05

3.8.3 Analisis Regresi Data Panel

Studi ini memakai metode analisis regresi data panel, yakni perpaduan dari data runtun waktu (*time-series*) dan data silang (*cross-section*) (Hildawati *et al.*, 2024). Ada beberapa kelebihan menggunakan data panel yaitu total penelitian akan bertambah banyak, kriteria yang diperkirakan semakin tepat, data yang diberikan lebih lengkap, mengurangi masalah korelasi antar variabel, serta meningkatkan kebebasan atau efisiensi proses estimasi (Anwar & Nursan, 2025). Pada observasi ini, data panel dipakai dalam variabel terikat yakni Kinerja Keuangan dan variabel independen yang lain. Dibawah ini merupakan model persamaan regresi data panel:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + eit$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan

α	= Konstanta
β	= Koefisien regresi
X1	= Belanja Modal (BM)
X2	= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X3	= Pertumbuhan Ekonomi (PE)
e	= error, variabel pengganggu
i	= Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur
t	= Periode/waktu

3.8.4 Uji Asumsi Klasik

Tahapan sebelum pengujian hipotesis, sebelumnya data diuji dulu dengan beberapa uji asumsi klasik, yaitu :

1. Uji Normalitas, berfungsi agar memahami bagaimana data residual berdistribusi normal. Metode *Kolmogorov-Smirnov* atau *Shapiro-Wilk* bisa digunakan, dan hasilnya dianggap normal jika $p\text{-value} > 0,05$ (Angelina *et al.*, 2020).
2. Uji Multikolinearitas, digunakan guna mendeteksi bagaimana terjadinya interaksi yang besar antarvariabel bebas. Jika nilai koefisien korelasi dalam tiap variabel bebas yakni kurang dari 0,85 maka tidak terjadi multikolinearitas.
3. Uji Heteroskedastisitas, tujuannya untuk memastikan bahwa *varians residual* tidak berubah-ubah. Uji *Glejser* digunakan sesuai aturan apabila skor probabilitas $> 0,05$, sehingga heteroskedastisitas tidak ada.
4. Uji Autokorelasi dipakai guna menilai bagaimana residual pada model regresi saling berkorelasi antarobservasi. Model regresi yang bagus sebaiknya tidak memperlihatkan keberadaan hubungan korelasi antara residual tersebut (Fadilah & Andriani, 2025). Metode untuk mengetahui autokorelasi yaitu dengan analisis “grafik, *Durbin-Watson*, *run*, serta *Langrange Multiplier*”. Metode *Langrange Multiplier* dilakukan jika skor probabilitas $chi\ squares < 0,05$, autokorelasi akan terjadi.

3.8.5 Pengujian Hipotesis

1. Uji R^2 atau Koefisien Determinasi

Koefisien R² menunjukkan seberapa baik model regresi cocok dengan data, dengan skor berkisar dari 0 - 1. Semakin bertambah nilai R², semakin bagus model itu dalam menggambarkan varians dari variabel terikat. Jika skor R² kecil, itu berarti faktor-faktor yang tidak tergantung tidak mampu menerangkan perubahan dalam variabel yang bergantung. Pada uji R², semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin baik mutu model tersebut, karena perbedaan pada variabel yang dipengaruhi bisa dihubungkan dengan variabel yang memengaruhi. Sehingga, model yang mempunyai nilai R² yang besar dianggap tambah akurat. Koefisien determinasi memperlihatkan sejauh mana variabel independen memberikan informasi tentang perbedaan dalam variabel terikat. Adjusted R Square digunakan dalam telaah yang melibatkan melebihi dua variabel bebas, namun R Square dipakai guna memperkirakan seberapa besar pengaruh variabel yang diselidiki ketika hanya mengikutsertakan satu atau dua variabel bebas (Fadilah & Andriani, 2025).

2. Uji Statistik T (Parsial)

Uji ini berguna untuk mengetahui bagaimana faktor yang tidak tergantung memiliki pengaruh terhadap faktor yang bergantung. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa skor signifikansi $\geq 0,05$, disimpulkan hipotesis ditolak dan koefisien regresi dipandang tidak memiliki arti statistik. Tetapi, koefisien regresi yang signifikan memperlihatkan jika variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas Apabila skor signifikansi dari koefisien korelasi lebih kecil dari 0,05, maka akibatnya dianggap signifikan dan hipotesis diterima (Ardelia *et al.*, 2022).

3.8.6 Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji ini dilaksanakan agar dapat mengetahui apakah variabel moderasi bisa memperkuat atau melemahkan dampak variabel bebas terhadap variabel terikat. Model persamaan yang digunakan guna menguji moderasi pada observasi ini bisa ditulis dibawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 Z + \beta_6 X_2 Z + \beta_7 X_3 Z + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan

X_1	= Belanja Modal
X_2	= Pendapatan Asli Daerah
X_3	= Pertumbuhan Ekonomi
Z	= Partisipasi Masyarakat
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_7$	= Koefisien Regresi
e	= Level Kesalahan (error)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian pada observasi ini merupakan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020-2024. Data sekunder yang dipakai yakni laporan realisasi anggaran pada data APBD yang diambil dari portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta PDRB dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diakses dengan website resmi Badan Pusat Statistik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk memenuhi kebutuhan penelitian, proses pemilihan sampel menerapkan *purposive sampling* yakni mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan. Dari sampel yang dipilih sebanyak 38 kabupaten/kota selama periode observasi lima tahun yakni tahun 2020-2024 sehingga (38 x 5 tahun) diperoleh 190 data pengamatan.

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Deskripsi awal untuk setiap variabel pada observasi yakni analisis statistik deskriptif. Di mana pada gambaran data tersebut, setiap variabelnya bisa diamati dari angka mean, maksimum-minimum, dan standar deviasi (Abdullah *et al.*, 2022). Pada studi ini menggunakan variabel kinerja keuangan (Y), belanja modal (X1), pendapatan asli daerah (X2), pertumbuhan ekonomi (X3), dan partisipasi masyarakat (Z). Berikut adalah hasil ouputnya:

Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik	BM	PAD	PE	KK	PM
Minimum	10.00903	10.76819	-0.064600	0.048195	-0.549506
Maksimum	12.30652	12.78004	0.088800	2.146286	1.566216
Rata-Rata	11.45724	11.60953	0.028493	0.326669	0.030135
Standar Deviasi	0.306003	0.318241	0.033386	0.327392	0.173152
Observation	190	190	190	190	190

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Dari tabel 4.1 diatas, bisa diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel belanja modal mempunyai skor rata-rata 11.45724 dan standar deviasi yaitu 0.306003. Skor minimum variabel belanja modal sebesar 10.00903 pada Kota Probolinggo periode 2024, kemudian skor maksimum senilai 12.30652 yaitu Kabupaten Bojonegoro periode 2023.
2. Pada variabel pendapatan asli daerah, diperoleh rata-rata senilai 11.60953 serta standar deviasi sebesar 0.318241 dari jumlah semua data penelitian yaitu 190 data. Skor minimum pendapatan asli daerah yaitu 10.76819 pada Kota Pasuruan tahun 2020 sedangkan skor maksimum senilai 12.78004 pada Kota Surabaya tahun 2024.
3. Pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata senilai 0,028493 sedangkan standar deviasi yaitu 0.033386. Angka minimum variabel pertumbuhan ekonomi senilai -0.064600 pada Kota Batu tahun 2020 dan skor maksimum yaitu 0.088800 pada Kabupaten Tuban tahun 2022.
4. Variabel kinerja keuangan menghasilkan rata-rata yaitu 0.326669 kemudian skor standar deviasi 0.327392. Nilai minimum variabel kinerja keuangan senilai 0.048195 yakni Kota Kediri periode 2021 serta skor maksimum senilai 2.146286 di Kota Surabaya tahun 2021.
5. Skor rata-rata pada variabel partisipasi masyarakat yaitu 0.030135 sedangkan standar deviasi senilai 0.173152. Skor minimum variabel partisipasi masyarakat adalah -0.549506 pada Kabupaten Mojokerto tahun 2020 dan skor maksimum yaitu 1.566216 di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021.

4.1.3 Analisis Pemilihan Model

Observasi ini memakai regresi data panel, maka penentuan model regresi yang tepat menjadi hal yang sangat penting. Terdapat 3 model yang digunakan, yaitu FEM (*Fixed Effect Model*), REM (*Random Effect Model*), dan CEM (*Common Effect Model*) (Anwar & Nursan, 2025). Berdasarkan beberapa model itu, ditentukan model paling tepat satu saja dengan penelitian yang dilakukan. Maka diperlukan beberapa pengujian model, yakni uji Chow, uji Hausman, serta uji Lagrange Multiplier.

4.1.3.1 Uji Chow

Dalam menentukan model regresi data panel dengan sangat sesuai diantara FEM dan CEM dilaksanakan uji chow. Pemilihan model didasarkan pada skor probabilitas cross-section F. Jika skor probabilitas $F \geq$ atau sama dengan 0,05, yang dipilih yaitu model CEM. Tetapi, apabila skor prob $F \leq$ atau sama dengan 0,05, FEM merupakan model yang sangat cocok untuk dipakai.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Crosss-section F	145.855142	(37,149)	0.0000
Cross-section Chi-square	687.196000	37	0.0000

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Dari result uji Chow dari Tabel 4.2, skor prob cross-section F dan cross-section Chi-square terdapat di bawah batas signifikansi 0,05. Kondisi tersebut dikarenakan skor probabilitas sebesar 0,00 yang $\leq$ 0,05. Jadi, dipilihlah model berdasarkan hasil uji Chow adalah FEM. Selanjutnya, untuk menentukan model yang akan digunakan, perlu dilakukan uji Hausman.

4.1.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilaksanakan guna menetapkan model regresi data panel dengan sangat sesuai dari REM dan FEM. Dasar pengambilan ketetapan pada uji ini adalah skor probabilitas pada cross-section random. Jikalau skor prob lebih kecil atau sama dengan 0,05, yang akan digunakan yakni model FEM. Sedangkan, jikalau angka prob $\geq$ atau sama dengan 0,05, REM dianggap sebagai model yang dipilih untuk digunakan.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.882217	3	0.0012

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Ditinjau dari *result* uji Hausman dalam Tabel 4.3, angka prob cross-section random yakni 0,00 atau $\leq$ 0,05. Hasil tersebut menjelaskan jika yang terpilih yaitu model FEM. Selain itu, result uji Chow juga uji Hausman

memberikan keputusan yang konsisten, sehingga bisa dirumuskan jika yang sangat tepat dipakai pada observasi ini yaitu model FEM.

4.1.4 Analisis Regresi Data Panel

Metode regresi data panel diterapkan pada observasi ini, yaitu teknik analisis dengan mengombinasikan data *cross-section* dan *time series* sampai bisa menyampaikan gambaran dengan semakin menyeluruh mengenai hubungan antarvariabel. Data *time series* yang dipakai meliputi jangka waktu pengamatan sepanjang 5 periode, yakni dari periode 2020 hingga 2024. Sementara itu, data *cross-section* berasal dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kombinasi kedua jenis data tersebut, analisis dapat dilakukan dengan makin tepat dan menyeluruh.

Berdasarkan *result* pengujian pemilihan model, yang sangat tepat dipakai pada observasi ini, yaitu model FEM. FEM yakni salah satu pendekatan dalam pendekatan LSDV (*Least Square Dummy Variable*) yang bisa menyesuaikan kesenjangan keunikan diantara kabupaten/kota. Setelah model terbaik ditentukan, tahap berikutnya adalah melakukan analisis regresi data panel guna menguji dampak variabel bebas pada variabel dependen. Pada observasi ini, variabel bebas mencakup Belanja Modal (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), dan Pertumbuhan Ekonomi (X3), kemudian variabel terikat yang dipakai adalah Kinerja Keuangan (Y) dengan proksi rasio kemandirian daerah. Adapun hasil analisis regresi data panel menggunakan model FEM disajikan dalam tabel dibawah.

Tabel 4. 4 Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4,840452	0,486800	-9,943410	0,0000
BM	-0,037482	0,021917	-1,710163	0,0893
PAD	0,482048	0,040916	11,78133	0,0000
PE	-0,007675	0,092580	-0,082897	0,9340
PM	0,013933	0,018919	0,736496	0,4626

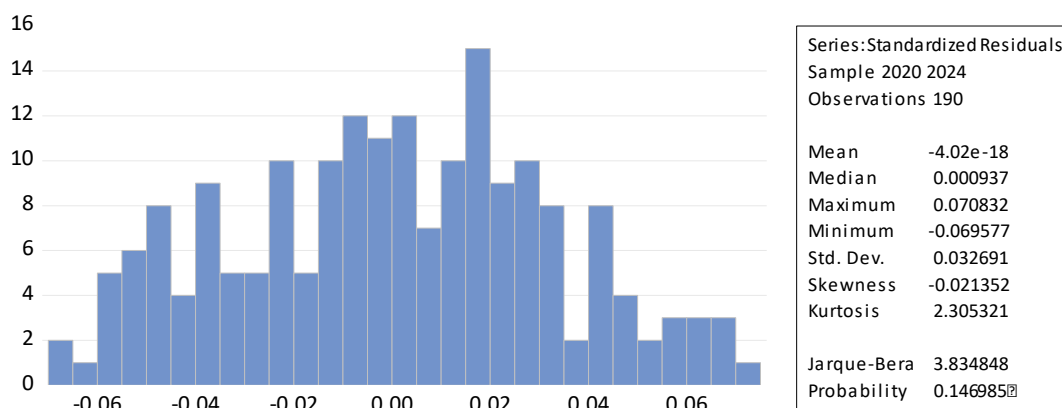
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

4.1.5 Uji Asumsi Klasik

4.1.5.1 Uji Normalitas

Untuk memastikan bahwa data penelitian memenuhi asumsi distribusi normal, maka dilakukan pengujian normalitas terhadap variabel yang digunakan. Berikut adalah hasil uji normalitas:

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan Gambar 4.1, result uji normalitas menunjukkan angka prob senilai 0,146985. Nilai tersebut terdapat melebihi batas signifikansi 0,05, maka ditarik kesimpulan bahwa pada observasi ini memenuhi asumsi normalitas dan berdistribusi normal.

4.1.5.2 Uji Multikolinearitas

Penelitian ini menggunakan uji multikolinearitas guna mengidentifikasi munculnya interaksi atau korelasi dengan tinggi antarvariabel independen. Keberadaan multikolinearitas dapat memengaruhi hasil analisis regresi karena berpotensi menimbulkan ketidakstabilan model serta mengurangi ketepatan dalam estimasi koefisien regresi. Dengan demikian, uji ini dilaksanakan guna meyakinkan jika variabel independen tidak memiliki korelasi yang kuat satu sama lain. Adapun result uji multikolinearitas disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas

	BM	PAD	PE
BM	1,000000	0,764433	0,025574

PAD	0,764433	1,000000	0,090927
PE	0,025574	0,090927	1,000000

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

Ditinjau dari hasil dari tabel 4.5, koefisien korelasi X1 dan X2 senilai $0,764433 < 0,85$, X1 dan X3 yaitu $0,025574 < 0,85$, serta X2 dan X3 senilai $0,090927 < 0,85$. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa lolos uji multolinearitas atau terhindar dari multikolinearitas.

4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini terjadi apabila varians residual pada model regresi bukan tetap, tetapi dipengaruhi oleh nilai variabel independen.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.23E-11	0.486800	4.58E-11	1.0000
BM	-2.38E-12	0.021917	-1.09E-10	1.0000
PAD	4.27E-13	0.040916	1.04E-11	1.0000
PE	1.65E-12	0.092580	1.78E-11	1.0000
PM	2.25E-13	0.018919	1.19E-11	1.0000

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Result uji heteroskedastisitas dari tabel tersebut, menghasilkan skor probabilitas pada seluruh variabel masing-masing sebesar 1,0000. Nilai probabilitas tersebut $\geq 0,05$. Kondisi ini mengindikasikan jika variabel-variabel tersebut pada model tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai residual. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwasannya heteroskedastisitas dalam model regresi tidak mengalami masalah, sehingga varians residual bersifat konstan (homokedastisitas).

4.1.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada observasi ini dilaksanakan melalui analisis koefisien determinasi dan uji parsial (uji T) guna memahami dampak setiap variabel independen kepada variabel terikat.

4.1.6.1 Uji R^2 atau Koefisien Determinasi

Berlandaskan tabel 4.7, memperoleh skor Adjusted R-square senilai 0,986743, maka kombinasi antarvariabel independent, variabel moderasi, variabel interaksi, dan variabel dependennya saat menggunakan model ini dapat dijelaskan

sebesar 98% kemudian sebagian kecilnya 2% dideskripsikan bersama variabel lain yang tidak diikutsertakan pada observasi ini.

Tabel 4. 7 Hasil Uji R2 atau Koefisien Determinasi

R-squared	0.989619
Adjusted R-squared	0.986743

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

4.1.6.2 Uji Statistik T (Parsial)

Tabel 4. 8 Hasil Uji Statistik T (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.840452	0.486800	-9.943410	0.0000
BM	-0.037482	0.021917	-1.710163	0.0893
PAD	0.482048	0.040916	11.78133	0.0000
PE	-0.007675	0.092580	-0.082897	0.9340
PM	0.013933	0.018919	0.736496	0.4626

Sumber: Diuji oleh peneliti, 2026

Berlandaskan tabel 4.8 tersebut, dapat disimpulkan:

1. Angka koefisien regresi senilai -0,04 dan skor probabilitas $0,09 \geq 0,05$ menunjukkan bahwasannya belanja modal tidak berdampak pada kinerja keuangan.
2. Result output menegaskan apabila pendapatan asli daerah memberi pengaruhnya pada kinerja keuangan. Bisa dibuktikan dari koefisien regresi senilai 0,48 dan skor probabilitas $0,00 \leq 0,05$.
3. Berdasarkan hasil output, pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh pada kinerja keuangan. Kondisi tersebut ditinjau dari skor probabilitas yaitu 0,93 yang $\geq 0,05$ serta koefisien regresi senilai -0,00.

4.1.7 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Tahap terakhir yaitu uji moderasi guna menganalisis apakah variabel moderasi mampu memperkuat atau memperlemah dampak belanja modal, PAD, dan pertumbuhan ekonomi pada kinerja keuangan. Pengujian ini dilaksanakan guna memahami apakah variabel moderasi bisa berdampak interaksi antar variabel

bebas dan variabel terikat. Adapun *result* uji moderasi yang sudah dilaksanakan disajikan dibawah ini.

Tabel 4. 9 Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5,769456	0,545640	-10,57374	0,0000
BM	-0,021892	0,021707	-1,008511	0,3149
PAD	0,546730	0,043614	12,53578	0,0000
PE	-0,045337	0,090979	-0,498323	0,6190
PM	-2,462730	0,620215	-3,970769	0,0001
BM*PM	-0,060056	0,115292	-0,520905	0,6032
PAD*PM	0,267010	0,125472	2,128054	0,0350
PE*PM	-0,655925	0,773864	-0,847597	0,3981

Sumber: Diuji oleh peneliti, 2026

Berdasarkan pada tabel 4.9 diatas, didapatkan persamaan moderasi sebagai berikut:

$$Y = -5,76 - 0,02*X_1 + 0,54*X_2 - 0,04*X_3 - 2,46*Z - 0,06*X_1Z + 0,26*X_2Z - 0,65*X_3Z + e$$

Berdasarkan tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi masyarakat dalam memoderasi tidak memiliki hubungan dari belanja modal dengan kinerja keuangan. Situasi tersebut dikarenakan nilai koefisien regresi sebesar -0,06 dan angka probabilitas senilai 0,60 dengan nilai $\geq 0,05$.
2. Result penelitian memperlihatkan jika partisipasi masyarakat dapat memoderasi dan memperkuat dampak dari PAD pada kinerja keuangan. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa skor koefisien regresi 0,26 serta nilai probabilitas 0,03 yang nilainya $\leq 0,05$.
3. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat tidak bisa memoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kinerja keuangan. Sehingga dapat dijelaskan dengan skor koefisien regresi yaitu -0,65 serta nilai probabilitas sebesar 0,39 nilainya $\geq 0,05$.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Result temuan memberikan hasil yaitu belanja modal tidak memberikan dampaknya kepada kinerja keuangan, dengan ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar -0,04 serta skor prob 0,09 atau $\geq 0,05$. Kondisi ini bisa disebabkan oleh pelaksanaan proyek-proyek belanja modal, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik lainnya, yang memerlukan waktu cukup panjang untuk diselesaikan sehingga manfaat ekonominya belum dapat dirasakan pada tahun anggaran yang sama. Berbeda dengan belanja operasional yang dampaknya terhadap aktivitas ekonomi cenderung lebih cepat terlihat (Zamzami & Rakhman, 2023). Selain itu, distribusi belanja modal yang kurang akurat berpeluang memicu pemborosan penggunaan anggaran dan mengurangi kontribusinya terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Akibatnya, meskipun belanja modal pada dasarnya bertujuan mendukung pembangunan dan kemajuan daerah, manfaatnya terhadap kinerja keuangan tidak selalu dapat terlihat secara langsung dalam jangka pendek.

Berdasar dari teori keagenan, pemerintah daerah selaku agen mempunyai kewajiban guna mengendalikan kapasitas dan aset daerah secara efektif, termasuk melalui penggunaan anggaran belanja modal yang didistribusikan sebagai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat untuk rakyat (Ardelia *et al.*, 2022). Dalam menjalankan tugas tersebut, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab atas pengadaan aset tetap, tetapi juga terhadap pemeliharaan dan pengelolaannya agar dapat memberikan manfaat paling menguntungkan. Temuan ini selaras dengan Agustina & Wardoyo (2024); Insani *et al.* (2023); Zamzami & Rakhman (2023) berpendapat yaitu belanja modal tidak mempunyai pengaruhnya kepada kinerja keuangan. Meskipun demikian, apabila belanja modal direncanakan dan dimanfaatkan secara efektif, maka pengeluaran tersebut berpotensi mengembangkan kinerja daerah melalui penyediaan pelayanan umum dengan lebih meningkat dan peningkatan kesejahteraan publik.

4.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Dari result penelitian, diperoleh nilai koefisien regresi senilai 0,48 dan angka probabilitas 0,00 yang $\leq 0,05$. Hasil tersebut mengindikasikan jika PAD memberi dampak positifnya yang signifikan pada kinerja keuangan. Temuan tersebut selaras bersama studi Yunita & Rasmini (2020) dan Digdowiseiso *et al.* (2022) menyimpulkan apabila PAD memberikan pengaruhnya yang positif kepada kinerja keuangan. Dengan demikian, PAD yang besar akan mampu dihimpun oleh sebuah wilayah, akan bertambah baik pula kinerja keuangan yang dicapai. Kondisi ini menunjukkan derajat swakelola daerah yang semakin besar, sebab pemerintah daerah mempunyai kemampuan yang melebihi saat membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan otonomi daerah yang independen pada transmisi dari otoritas nasional.

Berdasarkan teori keagenan, tingginya pendapatan asli daerah mencerminkan prestasi dari pemerintah daerah sebagai agen saat mengendalikan kekayaan serta potensi daerah guna memenuhi kepentingan masyarakat sebagai prinsipal (Jensen *et al.*, 1976). Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah berupaya meningkatkan perolehan daerah menjalani optimalisasi pemungutan retribusi dan pajak daerah. Hasil observasi ini mendukung pandangan tersebut, karena menunjukkan jika penambahan PAD bisa mendorong perbaikan kinerja finansial daerah. Namun, studi ini berbeda dari studi Andjarwati *et al.* (2021) yaitu menyimpulkan PAD tidak memberi dampaknya kepada kinerja keuangan.

4.2.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan

Berlandaskan result temuan, pertumbuhan ekonomi menghasilkan skor probabilitas yakni $0,93 \geq 0,05$ serta koefisien regresi senilai -0,00. Temuan ini mengindikasikan bahwa perkembangan ekonomi tidak berdampak pada hasil kinerja keuangan daerah. Meskipun demikian, otoritas daerah tetap wajib mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan aktivitas produksi barang dan jasa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mendukung efektivitas, efisiensi, dan kualitas manajemen finansial otoritas daerah hingga kinerja keuangan yang dihasilkan menjadi lebih optimal. Karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan

meningkatkan investasi dan pemasukan daerah akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan menjalankan program pembangunan (Nasirwan *et al.*, 2024).

Dalam konteks ini sejalan dengan teori keagenan, dimana pemerintah sebagai agen harus memilih strategi yang tepat guna memberi servis terbaik bagi publik yang memiliki peran selaku prinsipal. Karena masyarakat memiliki harapan terhadap kinerja optimal pemerintah, yang tercermin melalui penyajian laporan keuangan yang transparan serta peningkatan mutu pelayanan publik. Hasil studi ini sejalan dengan Insani *et al.* (2023); Nasirwan *et al.* (2024); Lubis & Ningsi (2022) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berdampak negatif pada kinerja keuangan.

4.2.4 Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai koefisien regresi senilai -0,06 dan angka probabilitas sebesar $0,60 \geq 0,05$. Hasil tersebut menegaskan jika keterlibatan masyarakat tidak mampu memoderasi pengaruh belanja modal kepada kinerja keuangan daerah. Situasi tersebut dikarenakan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan belanja modal, sehingga penggunaan anggaran belum sepenuhnya tepat guna serta keutamaan pembangunan daerah. Akibatnya, tujuan pembangunan serta peningkatan kinerja finansial daerah belum bisa terlaksana secara optimal. Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan secara lebih terstruktur, transparan, dan disertai edukasi yang memadai perlu terus didorong agar belanja modal dapat memberikan manfaat dengan sangat besar kepada peningkatan kinerja finansial otoritas daerah.

Berdasarkan teori keagenan, rendahnya partisipasi masyarakat dapat menimbulkan ketidaksesuaian tujuan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, sampai pelaksanaan belanja modal tidak berjalan secara optimal dan tujuan yang diharapkan menjadi sulit tercapai. Oleh karena itu, otoritas harus mengembangkan pembelajaran serta pemahaman publik terkait pentingnya keterlibatan dan fungsi pengawasan dalam pengelolaan anggaran

daerah. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang lebih aktif, efektivitas penggunaan belanja modal diharapkan dapat meningkat. Temuan observasi ini selaras bersama studi Maulida'arifina (2024) dengan mengindikasikan jika partisipasi masyarakat belum bisa memperkuat pengaruh belanja modal kepada kinerja keuangan.

4.2.5 Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat membuktikan bisa memoderasi dan memperkuat pengaruh PAD pada kinerja keuangan. Dilihat dari skor koefisien regresi senilai 0,26 yang bernilai positif serta skor probabilitas 0,03 yang $\leq 0,05$. Temuan ini sejalan dengan Ayu (2018) menjelaskan jika otoritas daerah perlu terus mengoptimalkan PAD karena peningkatannya mendukung kepada perbaikan kinerja finansial otoritas daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat yang diwujudkan melalui kepatuhan dalam membayar retribusi dan pajak daerah bisa mendorong peningkatan pemasukan daerah. Meningkatnya penerimaan tersebut akan memperkuat PAD, sampai otoritas daerah mempunyai kompetensi dengan semakin besar guna menanggung pengendalian otoritas dan pelaksanaan otonomi daerah secara mandiri.

Menurut *agency theory*, ketelibatan masyarakat bermanfaat untuk komponen pengendalian yang dapat menurunkan asimetri data diantara pemerintah selaku agen dan masyarakat selaku prinsipal. Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan mendorong meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam mengelola PAD. Maka dari itu, pengelolaan PAD bisa dilakukan secara makin efektif, efisien, dan sepadan sama kebutuhan serta keuntungan publik. Hasil penelitian tersebut sejalan bersama temuan Fadilah & Andriani (2025) yang menyatakan partisipasi masyarakat dapat memoderasi dampak pendapatan asli daerah pada kinerja keuangan dengan memperkuatnya.

4.2.6 Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan

Result penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak bisa memoderasi interaksi dari pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan skor koefisien regresi senilai -0,65 serta angka probabilitas yaitu 0,39 yang nilainya $\geq 0,05$. Situasi tersebut mungkin disebabkan oleh rendahnya keterlibatan masyarakat pada tahapan perancangan, penerapan, dan pengendalian anggaran daerah yang dapat mengakibatkan alokasi anggaran yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata penduduk. Karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek yang sangat dinamis, termasuk asumsi teknologi, jumlah tenaga kerja, cadangan modal, pertumbuhan penduduk, dan jumlah pengangguran, yang dimana semua itu membutuhkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan potensi daerah akan semakin kuat dalam meningkatkan kinerja finansial otoritas daerah (Insani *et al.*, 2023).

Menurut *agency theory*, keterlibatan masyarakat berperan dalam mewujudkan stabilitas hubungan diantara pemerintah selaku agen dan masyarakat selaku prinsipal. Partisipasi masyarakat ketika aktif dalam proses penyampaian, pengawasan, dan penyampaian aspirasi dapat mendorong pemerintah untuk menjalankan tugasnya secara lebih akuntabel dan responsif. Dengan demikian, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, misalnya dengan meningkatkan infrastruktur, layanan kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan meningkatkan produksi di sektor jasa dan barang modal. Hasil tersebut selaras bersama temuan yang dilaksanakan Maulida'arifina (2024) dengan menyebutkan partisipasi masyarakat tidak bisa memoderasi dampak pertumbuhan ekonomi kepada kinerja keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan result pengujian serta penjabaran tentang dampak belanja modal, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi pada kinerja keuangan pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi, maka bisa disimpulkan seperti dibawah ini:

1. Belanja modal tidak berdampak pada kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2024. Hal ini disebabkan proyek belanja modal membutuhkan waktu lama sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara langsung pada tahun berjalan. Namun, pada dasarnya belanja modal tetap memiliki peran penting dalam pengembangan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Pendapatan asli daerah berdampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2024. Apabila semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dihasilkan, maka semakin baik kinerja keuangan yang dicapai oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan otonominya.
3. Pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2024. Kondisi tersebut menegaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti perbaikan kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, otoritas daerah perlu memotivasi pertumbuhan ekonomi dengan menambahkan produksi barang dan jasa. Karena makin bertambahnya pertumbuhan ekonomi akan diharapkan kapitalisasi dan penerimaan daerah meningkat sehingga mendukung pelayanan publik dan pembangunan.
4. Partisipasi masyarakat memoderasi tidak dapat berhubungan antara belanja modal dengan kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur periode

2020-2024. Rendahnya keterlibatan masyarakat pada pengawasan, pelaksanaan, dan perencanaan belanja modal bisa menyebabkan pemborosan anggaran dan menghambat pencapaian kinerja keuangan. Sehingga diperlukan partisipasi yang lebih terstruktur, transparan, dan didukung edukasi agar berdampak optimal.

5. Partisipasi masyarakat dalam memoderasi bisa dengan memperkuat PAD pada kinerja keuangan kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2020-2024. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan PAD karena berdampak besar kepada kinerja keuangan. Kondisi ini bisa ditingkatkan melalui kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga mendukung kemandirian pembiayaan otonomi daerah.
6. Partisipasi masyarakat tidak bisa memoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi pada kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2020-2024. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dapat menyebabkan alokasi yang tidak efisien dan tidak sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian serta kesimpulan yang telah dirumuskan, beberapa saran berikut dapat dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:

1. Penelitian berikutnya, disarankan untuk memasukkan variabel independen lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, peneliti juga dianjurkan untuk mengkaji variabel moderasi lain yang memiliki peluang lebih besar dalam memperkuat hubungan antara variabel independen dengan kinerja keuangan, sehingga dapat memperluas dan memperdalam pemahaman tentang beberapa faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah.

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek yang masih belum banyak dilakukan penelitian, serta diharapkan menambah periode pengamatan agar data yang diperoleh menjadi lebih representatif dan memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi.
3. Peneliti berikutnya disarankan untuk menilai kinerja keuangan dengan memanfaatkan berbagai indikator rasio, seperti rasio efisiensi, efektivitas, dan ekonomi, agar analisis yang dihasilkan lebih mendalam dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Aiman, M. U. J., Fadilla, S. H. Z., Taqwin, Ardiawan, M. K. N., & Sari, M. E. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (N. Saputra, Ed.). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. <http://penerbitzaini.com>
- Agustina, D. S., & Wardoyo, D. U. (2024). Community Tax Compliance During the Covid 19 Pandemic In Medan: Export Study. *International Journal of Business Economics (IJBE)*, 7(1), 241–256. <https://doi.org/10.30596/ijbe.v4i1.11958>
- Al-Qur'an, K. A. R. (2019). *Alquran dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Amanda, C. D., & Praptoyo, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol 12 No 5 (2023)*.
- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). Analysis of Local Own Revenue and Balancing Funds on the Financial Performance of Districts and Cities in the Region of East Java Province. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(1), 235–250. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202112233>
- Andriani, S. (2012). Pengukuran Kinerja dengan Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (E-Journal)*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/em.v3i1.2349>
- Angelina, N., Efni, Y., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018. *Jurnal Bahtera Inovasi*, 4(1), 36–53. <https://doi.org/10.31629/bi.v4i1.2757>
- Anwar, & Nursan, M. (2025). *Buku Ajar Analisis Regresi Data Panel Dengan Aplikasi Eviewa* (F. Hijriyanti & Ramdoni, Eds.). Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI). <https://pustakabangsa.com/>
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>

- Arifah, P. H. K. N., Hidayat, N., & Arifin, S. (2023). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Competence: Journal of Management Studies*, 17(1), 9–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.19434>
- Arifin, Z., Maipita, I., & Hutasuht, S. (2020). The Effect Of Capital Expenditure And Economic Growth On The Human Development Index Of The District / City In North Sumatera. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 7(1), 585–594. <https://doi.org/10.14738/assrj.71.7741>
- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826>
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Ayu, P. P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 3(1), 80. <https://doi.org/10.29407/jae.v3i1.12007>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025, February 5). <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/1479/ekonomi-jawa-timur-tahun-2024-tumbuh-4-93-persenekonomi-jawa-timur-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-03-persen--y-on-y-ekonomi-jawa-timur-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-77-persen--q-to-q-.html>
- Budiana, R., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2020). *E-Proceeding of Management*, 8(6), 8368–8375.
- Burhan, M., Kartini, & Said, D. (2022). *Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi* (Vol. 18).
- Charles Heston Runtunuwu, P. (2023). The Impact Of Local Government's Financial Performance On Economic Growth, Unemployment, Poverty. *Economica*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.22202/economica.2023.v12.i1.6872>

- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572–2580. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.1150>
- Dwigantara, M. P., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–22.
- Fadilah, A. F., & Andriani, S. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 23(1), 179–198. <https://doi.org/10.24167/jab.v23i1.13363>
- Falah. (2024, September 25). *Refleksi Al Hasyr Ayat 7: Pentingnya Pemerataan Ekonomi*. Media Islam Situs Berita Islam Dan Peradaban.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hardani, Nur Hikmatul, A., Andriani, H., & Fardani, R. A. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.; 1st ed.). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Hildawati, Suhirman, L., Prisuna, B. F., Husnita, L., & Mardikawati, B. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif & Aplikasi Pengolahan Analisa Data Statistik* (Efitra, Ed.; 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. www.buku.sonpedia.com
- Ilmi, M. B. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Size Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan PEMDA. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 216–223. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.251>
- Insani, A., Rahayu, S., Erwati, M., & Jambi, U. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 109–125.
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Number 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>

- Lubis, I. T., & Ningsi, E. H. (2022). Determinants Of Financial Performance In Local Governments In District/City In Indonesia. *Enrichment: Journal of Management*, 12(2), 2385–2390. www.enrichment.iocspublisher.org
- Mahmudi. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Uii Press, Tran.).
- Mahri, A. J. W., Cupian, Al Arif, M. N. R., & Arundina, T. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (M. Irfan S. & A. Sakti, Eds.; 1st ed.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Maulida'arifina. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2023)*. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan .
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Muin, A. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif* (A. Maulana, Ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Mukti, T. (2023). Analisis Keuangan Publik Syariah Terhadap Pengelolaan Anggaran dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kulon Progo. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 9(2), 92–105. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v9i2.20271>
- Nasirwan, Ginting, A. B., Manalu, C., & Sinaga, D. A. (2024). The Influence of Local Government Size and Economic Growth on Local Government Financial Performance. *Economic: Journal Economic and Business*, 3(3), 165–171. <https://jurnal.larisma.or.id/index.php/ejeb/>
- Nasution, N. A., & Panggabean, F. Y. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8 (1), 1–19. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/122>
- Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen, 1(2), 22–34.
<https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>

Oktiani, A., Al Muhariah, N., Efrianti, R., & Al-Muhariah, N. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan*, 1(1), 16–35.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. 13 (2006).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, Pub. L. 107 (2024).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. 12 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. 71 (2010).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>

Periansya, Dewata, E., Sari, Y., & Nuvanti, F. (2021). The Effect of Locally Generated Revenue as an Intervening Variable on the Financial Performance of the Regional Government of South Sumatra Province. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 7(4), 80–98.
<https://doi.org/10.32602/jafas.2021.034>

Prasetiawati, W. F., & Winarsih. (2025). Peran Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Moderasi pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6 (1)(10.46306/rev.v6i1), 266–275.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rev.v6i1.969>

Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 132.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p06>

Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3620/3636>

- Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Menurut Jenis Belanja di Provinsi Jawa Timur (Rupiah) 2020-2022.* (2023). Badan Pemeriksa Keuangan. <https://jatim.bps.go.id/>
- Rinova, R., & Dewi, F. G. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Daerah Pemekaran di Pulau Sumatera). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 1–17. <https://doi.org/10.23960/jak.v24i2.192>
- Rohmad, M., Isma, A., & Ramli, F. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo As'ad Isma Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 17. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id>
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2), 96–111. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP>
- Saraswati, E. S., & Utomo, Y. P. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi Masyarakat, Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Hotel dan Restoran, Jumlah Wisatawan dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode Tahun 2012-2021. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3 (2), 192–200.
- Sari, M., & Aztisya, A. (2022). Determinants of Local Government Financial Performance. *International Journal of Business Economics (IJBE)*, 4(1), 52–64. <https://doi.org/10.30596/ijbe.v4i1.11958>
- Saud, I. M., Asterina, E., & Trisha, G. F. (2020). Factors Affecting Capital Expenditure Allocation: Empirical Evidence from Regency/City Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 21(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2102150>
- Setiani, I., & Ismunawan. (2022). Pengaruh Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol.1, No.3, 261–276. <https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/2201>
- Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 410. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.547>

- Soewardi, T. J., Putri, R. N. H., & Rizqi, I. P. (2023). Pandemi Covid-19 dan Realisasi Realokasi dan Refocusing Anggaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 4(2), 261–270. <https://doi.org/10.32500/jebe.v4i2.4467>
- Suandani, K. P., & Astawa, I. G. P. B. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 728–739.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Edisi Ketiga). Rajawali Pers.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. 1 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. 23 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. 33 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97. <https://jurnal.polban.ac.id/iarj/article/view/2364>
- Yaya, R., & Sukardi. (2025). Pengaruh Implementasi E-Government dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dengan Good Government Governance sebagai Variabel Pemoderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 69–81. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Yunita, P. V., & Rasmini, N. K. (2020). Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 1049. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i04.p20>

Zamzami, F., & Rakhman, F. (2023). Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(5), 332–347. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0148>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	BM	PAD	PE	KK	PM
Mean	11.45724	11.60953	0.028493	0.326669	0.030135
Median	11.43822	11.54554	0.043050	0.238810	0.005296
Maximum	12.30652	12.78004	0.088800	2.146286	1.566216
Minimum	10.00903	10.76819	-0.064600	0.048195	-0.549506
Std. Dev.	0.306003	0.318241	0.033386	0.327392	0.173152
Skewness	0.047837	1.125728	-1.197868	4.262709	4.326733
Kurtosis	5.679514	5.208127	3.328981	22.74746	37.72601
Jarque-Bera	56.91249	78.73029	46.29491	3662.607	10139.50
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	2176.875	2205.811	5.413600	62.06706	5.725651
Sum Sq. Dev.	17.69759	19.14141	0.210669	20.25800	5.666516
Observations	190	190	190	190	190

Lampiran 2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	145.855142	(37,149)	0.0000
Cross-section Chi-square	687.196000	37	0.0000

Lampiran 3 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

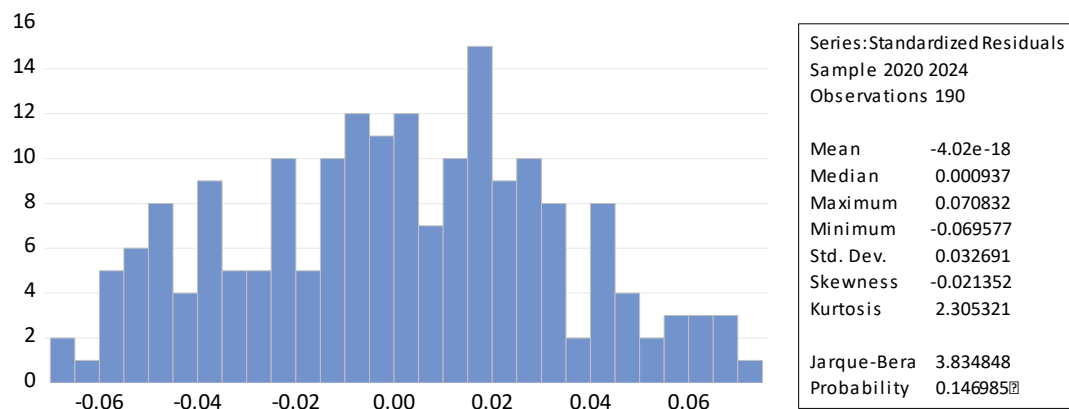
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.882217	3	0.0012

Lampiran 4 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: KK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/14/26 Time: 10:29
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.840452	0.486800	-9.943410	0.0000
BM	-0.037482	0.021917	-1.710163	0.0893
PAD	0.482048	0.040916	11.78133	0.0000
PE	-0.007675	0.092580	-0.082897	0.9340
PM	0.013933	0.018919	0.736496	0.4626

Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas



Lampiran 6 Hasil Uji Multikolinearitas

	BM	PAD	PE
BM	1.000000	0.764433	0.025574
PAD	0.764433	1.000000	0.090927
PE	0.025574	0.090927	1.000000

Lampiran 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESID01
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/14/26 Time: 11:05
 Sample: 2020 2024

Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.23E-11	0.486800	4.58E-11	1.0000
BM	-2.38E-12	0.021917	-1.09E-10	1.0000
PAD	4.27E-13	0.040916	1.04E-11	1.0000
PE	1.65E-12	0.092580	1.78E-11	1.0000
PM	2.25E-13	0.018919	1.19E-11	1.0000

Lampiran 8 Hasil Uji R2 atau Koefisien Determinasi

Root MSE	0.033270	R-squared	0.989619
Mean dependent var	0.326669	Adjusted R-squared	0.986743
S.D. dependent var	0.327392	S.E. of regression	0.037696
Akaike info criterion	-3.526224	Sum squared resid	0.210308
Schwarz criterion	-2.808461	Log likelihood	376.9913
Hannan-Quinn criter.	-3.235468	F-statistic	344.1014
Durbin-Watson stat	2.364562	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 9 Hasil Uji Statistik T (Parsial)

Dependent Variable: KK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/14/26 Time: 11:30
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.840452	0.486800	-9.943410	0.0000
BM	-0.037482	0.021917	-1.710163	0.0893
PAD	0.482048	0.040916	11.78133	0.0000
PE	-0.007675	0.092580	-0.082897	0.9340
PM	0.013933	0.018919	0.736496	0.4626

Lampiran 10 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Dependent Variable: KINERJA_KEUANGAN
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/11/26 Time: 19:14
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.769456	0.545640	-10.57374	0.0000
BELANJA_MODAL PENDAPATAN_ASLI_DAERA H	-0.021892	0.021707	-1.008511	0.3149
H	0.546730	0.043614	12.53578	0.0000
PERTUMBUHAN_EKONOMI	-0.045337	0.090979	-0.498323	0.6190
PARTISIPASI_MASYARAKAT	-2.462730	0.620215	-3.970769	0.0001
X1Z	-0.060056	0.115292	-0.520905	0.6032
X2Z	0.267010	0.125472	2.128054	0.0350
X3Z	-0.655925	0.773864	-0.847597	0.3981

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.031553	R-squared	0.990663
Mean dependent var	0.326669	Adjusted R-squared	0.987829
S.D. dependent var	0.327392	S.E. of regression	0.036118
Akaike info criterion	-3.600637	Sum squared resid	0.189158
Schwarz criterion	-2.831605	Log likelihood	387.0605
Hannan-Quinn criter.	-3.289113	F-statistic	349.6340
Durbin-Watson stat	2.397002	Prob(F-statistic)	0.000000

Sertifikasi dan Pelatihan

1. *Certified Accurate Professional* (CAP)
2. Pelatihan Brevet Pajak A & B
3. Pelatihan ATLAS (*Software Auditing*)

Lampiran 12 Jurnal Bimbingan

08/06/26, 18.00

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 220502110001
 Nama : Isma Hani
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Sri Andriani, M.Si
 Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Pemoderasi

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	2 September 2025	Pengajuan judul proposal	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
2	17 Oktober 2025	Revisi Bab 1 (Latar Belakang)	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
3	21 Oktober 2025	Fenomena penelitian	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
4	2 November 2025	Bab 2 (Kajian islam menggunakan Qur'an Kemenag)	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
5	16 November 2025	Bab 3 (analisis data)	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
6	19 November 2025	Acc bab 1,2,3 dan maju sempro	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
7	15 Februari 2026	Bimbingan kendala hasil olah data	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
8	8 Maret 2026	Bimbingan bab 4 dan 5, Revisi hasil penelitian dan pembahasan lengkapai dengan temuan yang ada	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
9	22 April 2026	Acc Bab 4 dan 5, Bimbingan Jurnal Publikasi sesuaikan dengan template jurnal yang di tuju dan tambahin citasinya	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
10	4 Mei 2026	Bimbingan Artikel, OK	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

08/06/26, 18.00

Print Jurnal Bimbingan Skripsi

11	9 Mei 2026	Acc submit artikel	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
12	2 Juni 2026	Acc pengajuan sidang afirmasi skripsi	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

Malang, 2 Juni 2026

Dosen Pembimbing



Sri Andriani, M.Si

Lampiran 13 Hasil Test Plagiarisme

17/06/26, 12:38

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : UP2M

Menyatakan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Isma Hani
NIM : 220502110001
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI
PEMODERASI

Menyatakan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
24%	21%	14%	19%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Juni 2026

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd